

RENCANA KERJA



2026

DINAS PUTR PROVINSI BENGKULU



KATA PENGANTAR

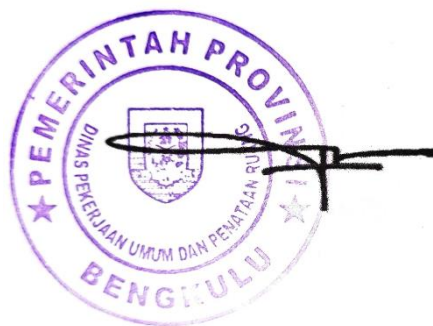
Puji syukur kami panjatkan kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan hidayahNya sehingga penyusunan Rencana Kerja (RENJA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik dan lancar.

Penyusunan Rencana Kerja (RENJA) tahun 2026 ini didasarkan atas pelaksanaan kegiatan yang mengarah pada program dan kegiatan yang tertuang pada Rencana Strategis (RENSTRA) tahun 2021-2026 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.

Demikian Rencana Kerja (RENJA) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG Provinsi Bengkulu yang dapat kami persembahkan, dengan harapan masukan dan saran serta petunjuk. Akhirnya dengan memohon petunjuk dan bimbingan dari Allah SWT semoga Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu mampu melaksanakan tugas dan pengabdian dengan sebaik – baiknya serta mampu meningkatkan prestasi kerja

Bengkulu, 23 JULI 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Bengkulu



TEJO SUROSO, ST, MT

NIP. 19781214 200502 1 003

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Landasan Hukum.....	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	5
1.4 Sistematika Penulisan.....	6
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU (2024).....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu (2024) dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	10
2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	19
2.3 Tugas dan fungsi isu – isu penting penyelenggaraan.....	37
2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir (Ranhir) RKPD.....	55
2.5 Penelaahan Usulan Program Dan Kegiatan Masyarakat.....	63
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN.....	66
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional.....	66
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.....	66
3.3 Program dan Kegiatan.....	68
BAB IV RENCANA KERJA PENDANAAN PERANGKAT DAERAH.....	70
4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan.....	70
BAB V PENUTUP.....	94
5.1 Pedoman Transisi.....	94
5.2 Kaidah Pelaksanaan.....	95

DAFTAR TABEL

Tabel	2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah Tahun 2024 Provinsi Bengkulu.....	12
Tabel	2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.....	35
Tabel	2.3	Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.....	51
Tabel	2.4	Review Terhadap Rancangan Akhir RKPD Tahun 2026 Provinsi Bengkulu.....	56
Tabel	2.5	Usulan Program dan Kegiatan Kabupaten Kota Tahun 2026.....	64
Tabel	4.1	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	70

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Proses Penyusunan Dokumen Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu.....	2
Gambar 1.2	Keterkaitan Dokumen Renja dengan Dokumen Lainnya.....	3
Gambar 3.1	Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu.....	67



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Kerja (RENJA) merupakan acuan setiap perangkat daerah (PD) dalam mengoperasionalkan program dan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam rangka mencapai visi jangka menengah daerah. Dengan rencana kerja yang terukur dan didukung oleh pendanaan, maka menjadi suatu instrumen dan indikator yang digunakan dalam upaya mewujudkan pembangunan daerah agar lebih terarah.

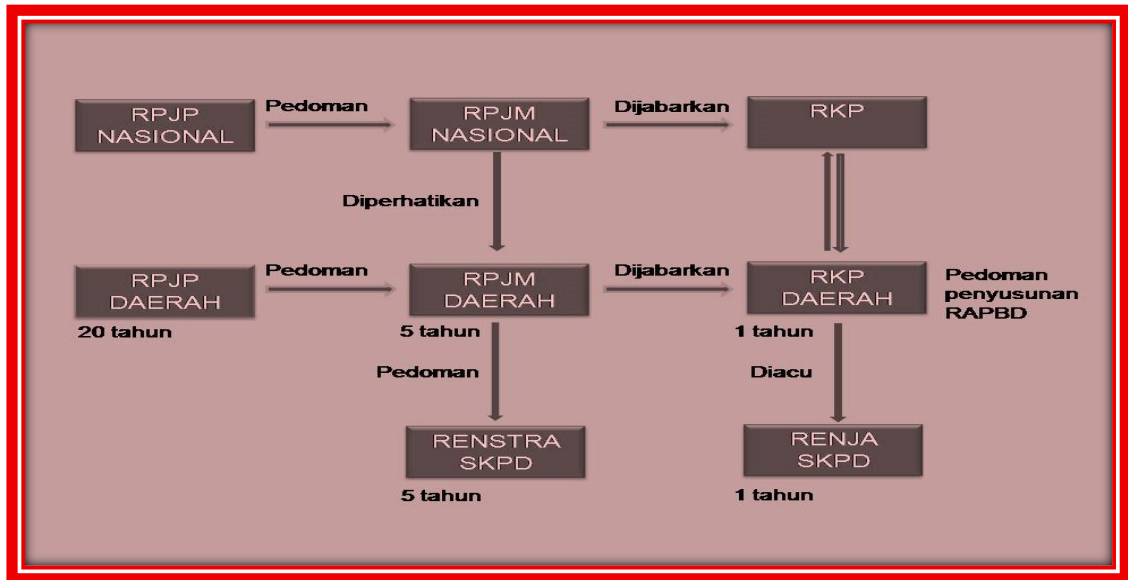
Penyusunan RENJA berpedoman pada renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu dan mengacu pada rencana kerja pemerintah daerah (RKPD). Penyusunan RENJA bukanlah kegiatan yang berdiri sendiri, melainkan merupakan rangkaian kegiatan yang simultan dengan penyusunan RKPD, serta merupakan bagian dari rangkaian kegiatan penyusunan APBD. Rencana Kerja Inspektorat merupakan bagian yang utuh dari rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) dan rencana strategis (RENSTRA) Inspektorat. Keduanya merupakan penjabaran dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004, tentang sistem perencanaan pembangunan nasional, Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah dan peraturan menteri dalam negeri nomor 28 tahun 2009 tentang perubahan atas peraturan menteri dalam negeri nomor 23 tahun 2007 tentang pedoman tata cara pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah, dengan demikian program dan kegiatan pembangunan yang ada pada dokumen perencanaan diatur secara rinci dalam rencana kerja (RENJA).

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu merupakan dokumen perencanaan SKPD untuk 1 (satu) tahunan. Dalam Rencana Kerja memuat visi, misi, tujuan, kebijakan dan strategi serta program dan kegiatan yang bersifat indikatif didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di daerah dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun dengan memperhitungkan kekuatan (*strength*), kelemahan (*weakness*), peluang (*opportunity*) dan ancaman (*treathment*) yang ada atau mungkin timbul dengan

Penyusunan Renja Dinas Provinsi Bengkulu menjadi bagian penting dari pelaksanaan sistem perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Dengan demikian Renja memiliki keterkaitan dengan dokumen lainnya baik itu dokumen perencanaan tingkat nasional maupun daerah. Gambaran mengenai keterkaitan Renja dengan dokumen perencanaan lainnya dapat dijelaskan dalam bagan berikut:

Gambar 1.2

Keterkaitan Dokumen Renja dengan Dokumen Lainnya



1.2 Landasan Hukum

Adapun pelaksanaan penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2025 dengan memperhatikan kepada peraturan perundang-undangan yang melandasi pelaksanaan Renja, (Dasar Hukum) yakni sebagai berikut :

1. Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
7. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2021; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 590);
12. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2008 Nomor 4), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 4 Tahun

- 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2013 Nomor 15);
13. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 6 Tahun 2010 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2010 Nomor 6);
 14. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
 15. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu (Lembaran Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2016 Nomor 8);
 16. Peraturan Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026;
 17. Peraturan Gubernur Nomor 35 Tahun 2021 Tentang Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2021 – 2026.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Renja Dinas Provinsi Bengkulu

Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2026 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan kondisi yang diinginkan setiap tahunnya dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam Perubahan Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolak ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Tujuan disusunnya Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2026 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu satu tahun sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Bappeda dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu.

Secara spesifik tujuan disusun Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun;
4. Memberikan pedoman alat pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu pada rentang 1 (satu) tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Mengemukakan pengertian ringkas tentang RENJA-OPD, proses penyusunan RENJA-OPD dengan dokumen RKPD, RENSTRA-OPD,

dengan RENJA Provinsi, serta tindak lanjut dengan proses penyusunan RAPBD

1.2 Landasan Hukum

Memuat penjelasan tentang undang – undang, peraturan pemerintah, peraturan daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK, kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta pedoman yang dijadikan acuan dalam penyusunan perencanaan dan penganggaran Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

1.3 Maksud dan Tujuan

Memuat penjelasan tentang maksud dan tujuan dari penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

1.4 Sistematika Penulisan

Menguraikan pokok bahasan dalam penulisan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, serta susunan garis besar isi dokumen.

BAB II : EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun Lalu (2024) dan Capaian Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun lalu (tahun 2024) dan perkiraan tahun berjalan (tahun 2025), mengacu pada APBD tahun berjalan yang seharusnya pada waktu penyusunan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sudah disahkan. Selanjutnya dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang tahun-tahun sebelumnya;

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007;

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Berisikan uraian mengenai sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dampak terhadap pencapaian visi dan misi kepala daerah, terhadap capaian program nasional, tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Bappeda dan formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk ditindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahunan yang direncanakan;

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir (Ranhir) RKPD

Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir (Ranhir)RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akhir (Ranhir) RKPD;

2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam bagian ini diuraikan hasil kajian terhadap program/ kegiatan yang diusulkan para pemangku kepentingan berdasarkan hasil dari penelitian lapangan dan pengamatan musrenbang kabupaten/kota serta usulan dari hasil reses anggota DPRD.

BAB III : TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional



Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Berisikan rencana program dan kegiatan beserta target capaian dan pagu indikatif tahun rencana dan prakiran maju.

BAB V : PENUTUP

Berisikan uraian penutup, berupa :

- 5.1 Catatan penting yang perlu mendapat perhatian, baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan;
- 5.2 Kaidah – Kaidah Pelaksanaan;
- 5.3 Rencana Tindak Lanjut;

BAB II

EVALUASI RENJA TAHUN LALU (2024)

2.1 EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG TAHUN LALU (2024) DAN CAPAIAN RENSTRA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tercapai tidaknya pelaksanaan program dan kegiatan yang telah disusun dapat dilihat berdasarkan Laporan Kinerja dan Laporan Keuangan. Laporan kinerja adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD. Kinerja sendiri merupakan keluaran/hasil dari kegiatan/program yang hendak atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas terukur. Pengukuran Laporan Kinerja dilakukan dengan menggunakan konsep Value for Money. Penggunaan konsep dimaksud memerlukan indikator-indikator sebagai berikut:

- Indikator Masukan (Input), untuk mengukur jumlah sumberdaya seperti anggaran (dana), SDM, peralatan, material, dan masukan lainnya untuk melakukan suatu kegiatan. Dengan meninjau distribusi sumberdaya dapat dianalisis apakah alokasi sumberdaya yang dimiliki telah sesuai dengan rencana strategis yang ditetapkan;
- Indikator Keluaran (Output), merupakan indikator yang diharapkan langsung dicapai dari suatu kegiatan, baik berupa fisik maupun berupa non fisik;
- Indikator Hasil (Outcome), merupakan indikator yang menunjukkan telah dicapainya maksud dan tujuan dari kegiatan – kegiatan yang telah selesai dilaksanakan atau indikator yang mencerminkan berfungsinya keluaran pada jangka menengah. Sedangkan Laporan Keuangan merupakan laporan pertanggungjawaban keuangan yang berbentuk laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas dan catatan atas laporan keuangan.

Perubahan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021 - 2026 yang memuat indikator keberhasilan suatu proses perencanaan pembangunan untuk kurun waktu 5 (lima) tahun, dijadikan tolak ukur untuk menilai sejauh mana pembangunan telah dilaksanakan. Renstra tersebut juga merupakan panduan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang selaku OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Kondisi daerah Provinsi Bengkulu terkait dengan urusan pekerjaan umum, dapat dilihat dari hasil indikator kinerja utama yang bermuara pada ketersediaan pelayanan fisik sarana dan prasarana meliputi jalan, jembatan, bangunan irigasi, sarana



pengaman dan pengendali banjir, saluran drainase, jalan lingkungan, sarana pengelolaan air minum dan air limbah dan bangunan gedung.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Bengkulu yang tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2021 – 2026 yaitu :

1. Persentase penanganan Jalan Provinsi;
2. Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan;
3. Persentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan;
4. Persentase Rumah Tangga yang terakses Instalasi Pengolahan Air Limbah;
5. Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik;
6. Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi sedang;
7. Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi rusak ringan
8. Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi rusak berat;

Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dilaksanakan setelah selesai tahun anggaran berjalan, hasil dari evaluasi tersebut digunakan sebagai bahan untuk Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di tahun selanjutnya dapat dilihat pada **tabel 2.1** dibawah ini.

RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU

Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Kinerja Anggaran Tahun 2024		Robot	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I s.d IV Rerita Persehat Daerah Tahun 2024				Outcome, Output, Sub Output			Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rekomendasi Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
			Kinerja	Pagu Indikatif (Rp)		Realisasi Kinerja	Satuan	Realisasi Anggaran TW I Rp	(%)	Realisasi Kinerja	Satuan	Realisasi Anggaran TW II Rp	(%)	Realisasi Kinerja	Satuan	Realisasi Anggaran TW III Rp	(%)	Realisasi Kinerja	Satuan	Realisasi Anggaran TW IV Rp				(%)	Capaian Kinerja	Satuan	Realisasi Anggaran		Satuan	Kinerja	Satuan	Persentase Capaian																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																											Rp	(%)					Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
3.1.1.3.3	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTW Kabupaten/Kota	1	Dokumen	75.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU

Kode	Tipe/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Kinerja Anggaran Tahun 2024		Bobot	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Trisemester I s.d. IV					Outcome, Output, Sub Output			Faktor Pendukung Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rekomendasi Tindak Lanjut yang Diperlukan Dalam Trisemester Berikutnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
			Kinerja			Pagu Indikatif (Rp)	Realisasi Kinerja (%)	Realisasi Anggaran TW I		Realisasi Anggaran TW II		Realisasi Anggaran TW III		Realisasi Anggaran TW IV		Capaian Kinerja	Realisasi Anggaran			Kinerja																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
			Target	Satuan				Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)	Rp	(%)		Rp	(%)	Satuan	Rp	(%)				Satuan	Rp	(%)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
5.1.2	Program: PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	Persentase bangunan gedung strategis dan lingkungannya yang ditingkatkan kualitasnya	0	Persen	3.007.708.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Selanjutnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.1.2.1	Kegiatan: Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung strategis dan lingkungannya yang ditingkatkan kualitasnya	1	Unit	3.007.708.000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Selanjutnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.1.2.1.1	Sub Kegiatan: Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya	1	Kawasa	100.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.1.2.1.2	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokum	1.933.418.000	100	-	18.805.900	0,97	-	-	59.905.490	3,10	-	-	-	1.155.645.787	59,77	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.1.2.1.3	Sub Kegiatan: Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah-Kawasan	1	Kawasa	750.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
5.1.2.1.4	Sub Kegiatan: Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	1	Dokum	74.290.000	100	-	Dokum	1.800.000	2,42	-	Dokum	1.200.000	1,62	-	Dokum	49.958.325	67,25	1	Dokum	2.020.000	2,72	1,00	Dokum	54.978.325	74,01	Persen	1	Dokum	100	1	Ketersediaan dana yang tercurangi 2. Pekerjaan selesai tepat waktu	-	-	Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Selanjutnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
5.1.2.1.5	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun	1	Dokum	150.000.000	100	-	Dokum	-	-	-	Dokum	-	-	-	2	Dokum	-	-	2	Dokum	-	-	2,00	Dokum	-	2	Dokum	200	1	Ketersediaan dana yang tercurangi 2. Pekerjaan selesai tepat waktu	-	-	Pembangunan Bangunan Gedung Untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi Selanjutnya																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
6	Tujuan: Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	Persentase panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi	2	Persen	1.325.000.000	-	-	-	-	-	-	66447700	5,01	-	-	-	158925738,7	11,99	1,18	Persen	988670211,3	74,62	1,18	Persen	1214043650	91,63	Persen	1	Persen	59	Tingginya intensitas ledakan	Inkonsistensi antara dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan	Mengajukan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6.1	Sasaran: Meningkatnya pengamanan terhadap sungai	Persentase peningkatan panjang sungai yang dinormalisasi	2,42	Persen	1.325.000.000	-	-	-	-	-	-	66.447.700	5,01	-	-	-	158.925.739	11,99	1,33	Persen	988.670.211	74,62	1,33	Persen	1.214.043.650	91,63	Persen	1	Persen	55	Tingginya intensitas ledakan	Inkonsistensi antara dokumen perencanaan sesuai dengan kebutuhan	Mengajukan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6.1.1	Program: PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Penanganan normalisasi sungai	0,478	Persen	1.325.000.000	-	-	-	-	-	-	66.447.700	5,01	-	-	-	158.925.739	11,99	0,016	Persen	988.670.211	74,62	0,02	Persen	1.214.043.650	91,63	Persen	0	-	3	Penyerangan angaran sesuai dengan yang direncanakan dan tepat waktu	Belum adanya data baseline terkait Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA dan Kawasan Beresda	Perlu adanya anggaran yang lebih untuk Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA dan Kawasan Beresda																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6.1.1.1	Kegiatan: Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	panjang sungai yang di normalisasi/restorasi	5,279	Km	1.325.000.000	-	-	-	-	-	-	66.447.700	5,01	-	-	-	158.925.739	11,99	0,2	Persen	988.670.211	74,62	0,20	Persen	1.214.043.650	91,63	Persen	0	-	4	Penyerangan angaran sesuai dengan yang direncanakan dan tepat waktu	Mengajukan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6.1.1.1.1	Sub Kegiatan: Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	10	Dokum	50.000.000	100	-	-	-	-	-	8.375.750	16,75	-	-	-	11.400.000	22,80	10	Dokum	15.703.400	31,41	10,00	Dokum	35.479.150	70,96	Persen	10	Dokum	100	1	Ketersediaan dana yang tercurangi 2. Pekerjaan selesai tepat waktu	Mengajukan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
6.1.1.1.2	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun	2	Dokum	300.000.000	100	-	-	-	-	-	27.608.650	9,20	3	Dokum	25.416.130	8,47	-	-	221.612.600	73,87	2,00	Dokum	274.637.380	91,55	Persen	2	Dokum	100	1	Ketersediaan dana yang tercurangi 2. Pekerjaan selesai tepat waktu	Mengajukan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
6.1.1.1.3	Sub Kegiatan: Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Diperbaiki	0,2	Km	325.000.000	100	-	-	-	-	-	7.867.000	2,42	0,2	KM	103.874.959	31,96	-	-	202.740.991	62,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU



Kode	Tujuan/Sasaran/Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Kuantitatif Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Kinerja Anggaran Tahun 2024				Bobot	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I s.d IV Bisa Perangkat Daerah Tahun 2024				Outcome, Output, Sub Output			Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rekomendasi Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Triwulan Berikutnya											
			Kinerja	Sasaran	Pagu Indikatif (Rp)	Realisasi Kinerja (%)		Sasaran	Realisasi Anggaran TW I (Rp)	Realisasi Kinerja (%)	Sasaran	Realisasi Anggaran TW II (Rp)	Realisasi Kinerja (%)	Sasaran	Realisasi Anggaran TW III (Rp)	Realisasi Kinerja (%)	Sasaran	Realisasi Anggaran TW IV (Rp)	Realisasi Kinerja (%)	Sasaran	Capaian Kinerja	Sasaran				Realisasi Anggaran (Rp)	Realisasi Kinerja (%)	Sasaran	Kinerja	Sasaran	Persentase Capaian					
7.1.1.1	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	8	Km	18.800.000.000	100	-	-	-	0,419	-	-	20.108.000	0,11	-	-	1.328.174.200	7,06	10,18	-	-	4.510.405.942	23,99	10,60	Km	5.858.688.142	31,16	Persen	11	-	131	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan		
7.1.1.2	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advisi dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	2	Dokumen	3.553.660.000	100	-	Dokumen	-	-	-	-	159.190.832	4,48	-	Dokumen	1.283.354.811	36,11	2	Dokumen	1.007.407.509	28,35	2,00	Dokumen	2.449.953.152	68,94	Persen	2	Dokumen	100	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan			
7.1.1.3	Sub Kegiatan: Pembangunan Jalan	Panjang jalan yang Dibangun	35	KM	25.000.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
7.1.1.4	Sub Kegiatan: Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan dan jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	5	KM	1.500.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.1.5	Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan	Panjang jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	10	Km	37.060.286.400	100	-	Km	-	-	Km	-	37.960.000	0,10	-	Km	6.131.916.070	16,55	13,24	Km	27.031.147.304	72,94	13,24	Km	33.201.023.374	89,59	Persen	13	Km	132	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan			
7.1.1.6	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	30	Jembatan	600.000.000	100	-	Jembatan	-	-	Jembatan	-	5.338.000	0,89	-	Jembatan	50.344.000	8,39	16	Jembatan	274.283.400	45,71	16,00	Jembatan	329.965.400	54,99	Persen	16	Jembatan	53	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan			
7.1.1.7	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	8	Km	35.165.224.700	100	-	-	-	-	-	-	9.020.826.360	25,65	7,99	-	14.766.090.411	41,99	0,497	-	10.313.025.323	29,33	8,49	Km	34.099.941.100	96,97	Persen	8	-	106	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan			
7.1.1.8	Sub Kegiatan: Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat	21	Km	3.381.645.900	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.1.9	Sub Kegiatan: Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1	KM	1.000.000.000	100	-	-	-	-	-	-	397.853.166	39,79	-	-	298.608.093	29,86	1336,11	-	224.225.900	22,42	1.336,11	Km	920.687.159	92,07	Persen	1.336	133,61	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan				
7.1.1.10	Sub Kegiatan: Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang Dibangun	1	Jembatan	4.099.790.000	100	-	Jembatan	-	-	Jembatan	-	1.205.933.700	29,41	1	Jembatan	2.825.769.600	68,92	1,00	Jembatan	4.031.703.300	98,34	Persen	1	Jembatan	100	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan							
7.1.1.11	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jalan	Panjang jalan yang Direhabilitasi	3	KM	7.100.000.000	100	-	KM	-	-	KM	-	1.365.426.125	19,23	-	KM	3.186.494.292	44,88	5,3	KM	713.201.600	10,05	5,30	KM	5.265.122.017	74,16	Persen	5	KM	177	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan			
7.1.1.12	Sub Kegiatan: Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1	Dokumen	2.500.000.000	100	-	-	-	-	-	-	50.280.000	2,01	10,56	-	452.551.094	18,10	16,47	-	1.814.324.185	72,57	27,03	KM	2.317.155.279	92,69	Persen	27	2.703	-	-	-	-	-		
8	Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SASIP	88	(100)	35.233.829.972	100	-	Predikat	8.976.651.913	25,48	-	Predikat	8.057.865.125	22,87	-	Predikat	6.976.709.095	19,80	88	(100)	Predikat	8.486.711.158	24,09	88	(100)	Predikat	32.497.937.291	92,24	Predikat	88	(100)	Predikat	100	Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SASIP di lingkungan Provinsi menjadi A dengan di
8.1	Sasaran: Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SASIP	88	(100)	35.233.829.972	100	-	Predikat	8.976.651.913	25,48	-	Predikat	8.057.865.125	22,87	-	Predikat	6.976.709.095	19,80	88	(100)	Predikat	8.486.711.158	24,09	88	(100)	Predikat	32.497.937.291	92,24	Predikat	88	(100)	Predikat	100	Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SASIP di lingkungan Provinsi menjadi A dengan di
8.1.1	Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	80	Persen	35.233.829.972	100	-	Persen	8.976.651.913	25,48	-	Persen	8.057.865.125	22,87	-	Persen	6.976.709.095	19,80	85	Persen	8.486.711.158	24,09	85,00	Persen	32.497.937.291	92,24	Persen	85	Persen	106	Kegiatan Rutin dilakukan sesuai dengan rencana dan jadwal, belum ada	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat				
		Persentase layanan administrasi perantara	100	Persen	-	100	-	Persen	-	-	-	-	-	-	-	Persen	100	Persen	100	Persen	-	-	-	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Kurangnya SDM yang menguasai bidang Aset sehingga perencanaan, mengat	
		Persentase dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	100	Persen	-	100	-	Persen	-	-	-	-	-	-	-	Persen	100	Persen	100	Persen	-	-	-	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Kurangnya SDM yang menguasai bidang Aset sehingga perencanaan, mengat	
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	24	Persen	-	100	-	Persen	-	-	-	-	-	-	-	Persen	100	Persen	100	Persen	-	-	-	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Kurangnya SDM yang menguasai bidang Aset sehingga perencanaan, mengat	
			24	Persen	-	100	-	Persen	-	-	-	-	-	-	-	Persen	100	Persen	100	Persen	-	-	-	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Kurangnya SDM yang menguasai bidang Aset sehingga perencanaan, mengat	
8.1.1.1	Kegiatan: Penyediaan Jasa Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	3	Jenis	3.617.500.000	100	-	Jenis	717.417.100	19,72	-	Jenis	910.644.324	25,03	-	Jenis	862.407.276	23,71	3	Jenis	1.049.695.970	28,86	3,00	Jenis	3.540.365.170	97,32	Jenis	3	Jenis	100	Konsistensi Anggaran perencanaan dan penganggaran	Keterbatasan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan	Mengingat dan Menambah Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan			
8.1.1.1.1	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Laporan	10.000.000	100	-	Laporan	2.000.000	20,00	-	Laporan	3.800.000	38,00	-	Laporan	4.000.000	40,00	1	Laporan	-	-	1,00	Laporan	9.800.000	98,00	Laporan	1	Laporan	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat			
8.1.1.1.2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Laporan	700.000.000	100	-	Laporan	121.417.100	17,35	-	Laporan	102.344.324	14,62	-	Laporan	220.340.976	31,48	1	Laporan	262.695.970	37,53	1,00	Laporan	706.798.370	100,97	Laporan	1	Laporan	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat			
8.1.1.1.3	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Laporan	2.877.500.000	100	-	Laporan	594.000.000	20,64	-	Laporan	804.500.000	27,96	-	Laporan	638.066.800	22,17	1	Laporan	787.000.000	27,35	1,00	Laporan	2.823.566.800	98,13	Laporan	1	Laporan	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat			
8.1.1.1.4	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (SPAM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Perawatan dan Perengkapan Kantor yang Disediakan (SPAM)	1	Laporan	50.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1.1.2	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	0	Orang	30.000.000	100	-	Orang	-	-	Orang	-	14.700.100	49,00	-	Orang	14.700.100	49,00	1	Orang	-	-	1,00	Orang	14.700.100	49,00	Orang	1	Orang	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Keterbatasan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan	Menggunakan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan			
8.1.1.2.1	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (PDI)	12	Orang	30.000.000	100	-	Orang	-	-	Orang	-	14.700.100	49,00	-	Orang	14.700.100	49,00	1	Orang	-	-	1,00	Orang	14.700.100	49,00	Orang	1	Orang	8	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Keterbatasan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan	Menggunakan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan			
8.1.1.3	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Pemenuhan Urusan Pemerintahan Daerah yang Disediakan	45	Unit	3.592.458.000	100	-	Paket	2.437.549.700	67,85	-	Paket	83.500.000	2,32	-	Paket	42.900.000	1,19	2	Paket	1.073.655.000	29,89	2,00	Paket	3.637.604.700	101,26	Paket	2	Paket	4	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Keterbatasan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan	Menggunakan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan			
8.1.1.3.1	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	900.600.000	100	-	Paket	696.915.000	77,38	1	Paket	-	-	-	Paket	167.195.000	18,56	1,00	Paket	864.110.000	95,95	1,00	Paket	864.110.000	95,95	Paket	1	Paket	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat			
8.1.1.3.2	Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Angkutan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Angkutan yang Disediakan	1	Unit	700.000.000	100	-	unit	-	-	unit	-	-	-	-	unit	673.200.000	96,17	1,00	unit	673.200.000	96,17	unit	unit	673.200.000	96,17	unit	1	unit	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat			
8.1.1.3.3	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang Disediakan	20	Unit	1.991.858.000	100	-	Unit	#####	87,39	-	Unit	83.500.000	4,19	-	Unit	42.900.000	2,15	20	Unit	233.260.000	11,71	20,00	Unit	2.100.294.700	105,44	Unit	20	Unit	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat			
8.1.4	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Jenis	25.122.977.972	100	-	Jenis	5.767.144.113	22,96	-	Jenis	6.670.164.058	26,55	-	Jenis	5.496.649.503	21,88	4	Jenis	4.867.915.352	19,38	4,00	Jenis	22.801.873.036	90,76	Jenis	4	Jenis	80	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Keterbatasan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan	Menggunakan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan			
8.1.4.1	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokumen	30.930.000	100	-	Dokumen	30.930.000	10,55	-	Dokumen	48.780.000	13,91	1	Dokumen	101.504.000	34,62	1,00	Dokumen	221.349.000	75,50	1,00	Dokumen	321.349.000	75,50	Dokumen	1	Dokumen	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat			
8.1.4.2	Sub Kegiatan: Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	1	Dokumen	10.000.000	100	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	4.065.000	40,65	-	Dokumen	-	-	1	Dokumen	2.500.000	25,00	1,00	Dokumen	6.565.000	65,65	Dokumen	1	Dokumen	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat			
8.1.4.3	Sub Kegiatan: Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	247	Orang/Bulan	24.799.817.972	100	-	802	#####	23,13	802	6.617.964.058	26,69	802	5.455.419.503	22,00	802	4.763.911.352	19,21	3.208,00	-	22.573.509.026	91,02	3.208	-	22.573.509.026	91,02	Persen	1.299	1.299	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat			
8.1.4.4	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	Laporan	10.000.000	100	-	laporan	-	-	laporan	-	-	-	-	laporan	450.000	4,50	1	laporan	-	-	1,00	laporan	450.000	4,50	laporan	1	laporan	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat			
8.1.4.5	Sub Kegiatan: Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	1	Laporan	10.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1.5	Kegiatan: Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang Disediakan	24	Dokumen	332.451.500	100	-	Dokumen	-	-	Dokumen	-	53.445.000	16,08	-	Dokumen	71.745.000	21,58	12	Dokumen	80.335.000	24,16	14,00	Dokumen	205.525.000	61,82	Dokumen	14	Dokumen	58	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya SDM di Subbidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Kinerja	Menggunakan Anggaran pada tahun berikutnya sesuai dengan kebutuhan			



Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Kinerja Anggaran Tahun 2024		Bobot	TW I				TW II				TW III				TW IV				Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I s.d IV Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Outcome, Output, Sub Output			Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rekomendasi Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Tindakan Berikutnya			
			Kinerja Target	Sasaran		Page Indikatorif (Rp)	(N)	Realisasi Kinerja	Sasaran	Realisasi Anggaran TW I		Realisasi Kinerja	Sasaran	Realisasi Anggaran TW II		Realisasi Kinerja	Sasaran	Realisasi Anggaran TW III		Realisasi Kinerja	Sasaran	Realisasi Anggaran TW IV		Capaian Kinerja	Sasaran	Realisasi Anggaran		Kinerja				Sasaran	Persentase Capaian	
										Rp	(N)			Rp	(N)			Rp	(N)			Rp	(N)			Rp	(N)							Rp
7.1.1.1	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	8	Km	18.800.000.000	100	-	-	-	-	0,419	-	20.108.000	0,11	-	1.328.174.200	7,06	10,18	4.510.405.942	23,99	10,60	Km	5.858.688.142	31,16	Persen	11	Km	133	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan		
7.1.1.2	Sub Kegiatan: Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi Pengembangan Jaringan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Advis dan Layanan Teknis, Kajian Kebijakan, Bantuan Teknis, Bimbingan Teknis, Pengelolaan Pengendalian	2	Dokum en	3.553.660.000	100	-	Dokumen	-	-	-	Dokumen	159.190.832	4,48	-	Dokumen	1.283.354.811	36,11	2	Dokumen	1.007.407.509	28,35	2,00	Dokumen	2.449.953.152	68,94	Persen	2	Dokumen	100	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan
7.1.1.3	Sub Kegiatan: Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	35	KM	25.000.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.1.4	Sub Kegiatan: Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	5	KM	1.500.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.1.5	Sub Kegiatan: Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Rekonstruksi Jalan	10	Km	37.060.286.400	100	-	Km	-	-	-	Km	37.960.000	0,10	-	Km	6.131.916.070	16,55	13,24	Km	27.031.147.304	72,94	13,24	Km	33.201.023.374	89,59	Persen	13	Km	132	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan
7.1.1.6	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Rutin	30	Jembat an	600.000.000	100	-	Jembatan	-	-	-	Jembatan	5.338.000	0,89	-	Jembatan	50.344.000	8,39	16	Jembatan	274.283.400	45,71	16,00	Jembatan	329.965.400	54,99	Persen	16	Jembatan	53	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan
7.1.1.7	Sub Kegiatan: Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	8	Km	35.165.224.700	100	-	-	-	-	-	9.020.825.366,00	25,65	7,99	14.766.090.411	41,99	0,497	10.313.025.323	29,33	8,49	Km	34.099.941.100	96,97	Persen	8	Km	106	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan			
7.1.1.8	Sub Kegiatan: Pengawasan Penyelenggaraan Jalan	Panjang Jalan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	21	KM	3.381.645.900	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
7.1.1.9	Sub Kegiatan: Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Jumlah Data dan Informasi Terkait Kondisi Jalan/Jembatan	1	KM	1.000.000.000	100	-	-	-	-	-	397.853.166	39,79	-	298.608.093	29,86	1336,11	224.225.900	22,42	1.336,11	Km	920.687.159	92,07	Persen	1.336	Km	133.611	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan			
7.1.1.10	Sub Kegiatan: Pembangunan Jembatan	Panjang jembatan yang Dibangun	1	Jembat an	4.099.790.000	100	-	Jembatan	-	-	-	Jembata	-	-	-	Jembatan	1.205.933.700	29,41	1	Jembatan	2.825.769.600	68,92	1,00	Jembatan	4.031.703.300	98,34	Persen	1	Jembatan	100	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan
7.1.1.11	Sub Kegiatan: Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	3	KM	7.100.000.000	100	-	KM	-	-	-	KM	1.365.426.125	19,23	-	KM	3.186.494.292	44,88	5,3	KM	713.201.600	10,05	5,30	KM	5.265.122.017	74,16	Persen	5	KM	177	Koordinasi yang baik antara OPD dan Pelaksana Proyek	-	-	Penambahan APBD untuk perbaikan jalan
7.1.1.12	Sub Kegiatan: Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Jumlah Dokumen Teknis Pengawasan Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	1	Dokum en	2.500.000.000	100	-	-	-	-	-	50.280.000,00	2,01	10,56	452.551.094	18,10	16,47	1.814.324.185	72,57	27,03	KM	2.317.155.279	92,69	Persen	27	KM	2.703	-	-	-	-	-		
8	Tujuan: Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	88 (100)	Predika t	35.233.829.972	-	-	Predikat	8.976.651.913	25,48	-	Predikat	8.057.865.125	22,87	-	Predikat	6.976.709.095	19,80	88 (100)	Predikat	8.486.711.158	24,09	88 (100)	Predikat	32.497.937.291	92,24	Predikat	88 (100)	Predikat	100	Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di	
8.1	Sasaran: Meningkatkan Tata Kelola Kinerja OPD	Nilai Evaluasi SAKIP	88 (100)	Predika t	35.233.829.972	-	-	Predikat	-	-	-	Predikat	-	-	-	Predikat	-	88 (100)	Predikat	-	88 (100)	Predikat	-	Predikat	88 (100)	Predikat	100	Konsistensi Dokumen Perencanaan dan Penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di				
8.1.1	Program: PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Sarana dan Prasarana Kantor dalam Kondisi Baik	80	Persen	35.233.829.972	-	-	Persen	8.976.651.913	25,48	-	Persen	8.057.865.125	22,87	-	Persen	6.976.709.095	19,80	85	Persen	8.486.711.158	24,09	85,00	Persen	32.497.937.291	92,24	Persen	85	Persen	106	Kegiatan Rutin dilakukan sesuai dengan rencana dan sesuai tepat waktu	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat	
		Persentase layanan administrasi perkantoran	100	Persen	-	-	-	Persen	-	-	-	Persen	-	-	-	Persen	-	100	Persen	-	100	Persen	-	Persen	100	Persen	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya SOM yang menguasai bidang Aset sehingga prosesnya kurang optimal	Meningkatkan ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi untuk melakukan	Meningkatkan ASN di Lingkungan Dinas PUPR Provinsi untuk melakukan			
		Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	100	Persen	-	-	-	Persen	-	-	-	Persen	-	-	-	Persen	-	100,00	Persen	-	100,00	Persen	-	Persen	100	Persen	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di				
		Persentase ASN yang ditingkatkan kompetensinya	24	Persen	-	-	-	Persen	-	-	-	Persen	-	-	-	Persen	-	18,33	Persen	-	18,33	Persen	-	Persen	18	Persen	76	Konsistensi Dokumen Perencanaan Evaluasi dan Pelaporan baik dari segi	Kurangnya SDM di Subbidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatkan ASN di Subbidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan	Meningkatkan ASN di Subbidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan			
8.1.1.1	Kegiatan: Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	3	Jenis	3.637.500.000	-	-	Jenis	717.417.100	19,72	-	Jenis	910.644.324	25,03	-	Jenis	862.407.776	23,71	3	Jenis	1.049.695.970	28,86	3,00	Jenis	3.540.165.170	97,32	Jenis	3	Jenis	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di	
8.1.1.1.1	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	1	Lapora n	10.000.000	100	-	Laporan	2.000.000	20,00	-	Laporan	3.800.000	38,00	-	Laporan	4.000.000	40,00	1	Laporan	-	-	1,00	Laporan	9.800.000	98,00	Laporan	1	Laporan	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di	
8.1.1.1.2	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	1	Lapora n	700.000.000	100	-	Laporan	121.417.100	17,35	-	Laporan	102.344.324	14,62	-	Laporan	220.340.976	31,48	1	Laporan	262.695.970	37,53	1,00	Laporan	706.798.370	100,97	Laporan	1	Laporan	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di	
8.1.1.1.3	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	1	Lapora n	2.877.500.000	100	-	Laporan	594.000.000	20,64	-	Laporan	804.500.000	27,96	-	Laporan	638.066.800	22,17	1	Laporan	787.000.000	27,35	1,00	Laporan	2.823.566.800	98,13	Laporan	1	Laporan	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di	
8.1.1.1.4	Sub Kegiatan: Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (SPAM)	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (SPAM)	1	Lapora n	50.000.000	100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
8.1.1.2	Kegiatan: Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapastisnya	0	Orang	30.000.000	-	-	Orang	-	-	-	Orang	-	-	-	Orang	14.700.100	49,00	1	Orang	-	-	1,00	Orang	14.700.100	49,00	Orang	1	Orang	8	Keterbatasan Anggaran untuk mendukung Program PENUNJANG URUSAN	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di	
8.1.1.2.1	Sub Kegiatan: Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Diklat)	12	Orang	30.000.000	100	-	Orang	-	-	-	Orang	-	-	-	Orang	14.700.100	49,00	1	Orang	-	-	1,00	Orang	14.700.100	49,00	Orang	1	Orang	8	Keterbatasan Anggaran untuk mendukung Program PENUNJANG URUSAN	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di	
8.1.1.3	Kegiatan: Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang disediakan	45	Unit	3.592.458.000	-	-	Paket	2.437.549.700	67,85	-	Paket	83.500.000	2,32	-	Paket	42.900.000	1,19	2	Paket	1.073.655.000	29,89	2,00	Paket	3.637.604.700	101,26	Paket	2	Paket	4	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di	
8.1.1.3.1	Sub Kegiatan: Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	1	Paket	900.600.000	100	-	Paket	696.915.000	77,38	1	Paket	-	-	-	Paket	167.195.000	18,56	1,00	Paket	864.110.000	95,95	1,00	Paket	864.110.000	95,95	Paket	1	Paket	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di	
8.1.1.3.2	Sub Kegiatan: Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang diadakan	1	Unit	700.000.000	100	-	unit	-	-	-	unit	-	-	-	unit	-	-	1	unit	673.200.000	96,17	1,00	unit	673.200.000	96,17	unit	1	unit	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di	
8.1.1.3.3	Sub Kegiatan: Pengadaan Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	Jumlah Peralatan dan Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan	20	Unit	1.991.858.000	100	-	Unit	1.740.634.700	87,39	-	Unit	83.500.000	4,19	-	Unit	42.900.000	2,15	20	Unit	233.260.000	11,71	20,00	Unit	2.100.294.700	105,44	Unit	20	Unit	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di	
8.1.1.4	Kegiatan: Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	5	Jenis	25.122.977.972	-	-	-	5.767.144.113	22,96	-	-	6.670.164.058	26,55	-	-	5.496.649.503	21,88	4	-	4.867.915.352	19,38	4,00	-	22.801.873.026	90,76	4	80	Keterbatasan Anggaran untuk mendukung Program PENUNJANG URUSAN	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di			
8.1.1.4.1	Sub Kegiatan: Pelaksanaan Pengujian/Verifikasi Keuangan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	1	Dokum en	293.160.000	100	-	Dokumen	30.930.000	10,55	-	Dokumen	48.135.000	16,42	-	Dokumen	40.780.000	13,91	1	Dokumen	101.504.000	34,62	1,00	Dokumen	221.349.000	75,50	Dokumen	1	Dokumen	100	Konsistensi dokumen perencanaan dan penganggaran	Kurangnya Pemahaman dari Bidang/UPD di Lingkungan Dinas PUPR	Meningkatkan Nilai e-SAKIP DPUPR Provinsi menjadi A dengan di	

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU



DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU



Kode	Tujuan/Sasaran/Program /Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan	Target dan Kinerja Anggaran Tahun 2024		Bobot	TW I		TW II		TW III		TW IV		Capaian Kinerja dan Realisasi Anggaran Triwulan I s.d IV Renja Perangkat Daerah Tahun 2024				Outcome, Output, Sub Output			Faktor Pendorong Keberhasilan Kinerja	Faktor Penghambat Pencapaian Kinerja	Rekomendasi Tindak Lanjut Yang Diperlukan Dalam Tiwulan Berikutnya											
			Kinerja			Pagu Indikatif Rp	Realisasi Kinerja (%)	Satuan	Realisasi Anggaran TW I		Realisasi Kinerja (%)	Satuan	Realisasi Anggaran TW II		Realisasi Kinerja (%)	Satuan	Realisasi Anggaran TW III		Realisasi Kinerja (%)	Satuan				Realisasi Anggaran TW IV		Capaian Kinerja	Satuan	Realisasi Anggaran		Kinerja	Satuan	Persentase Capaian		
			Target	Satuan					Rp	(%)			Rp	(%)			Rp	(%)						Rp	(%)			Rp	(%)				Rp	(%)
8.1.1.4.2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	1	Unit	275.000.000	100	-	unit	3.600.000	1,31	-	unit	107.990.000	39,27	-	unit	71.340.000,00	25,94	1	unit	76.317.500	27,75	1,00	unit	259.247.500	94,27	unit	1	unit	100	-	dari jumlah alat berat ada 10 [unit] hanya dipelihara 9 [unit] alat berat.	Tetap mempertahankan rencana dan penyerapan anggaran yang sesuai tepat waktu	
10	Tujuan : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Alat Laboratorium	Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik	95	Persen	907.221.500	-	-	Persen	4.300.000	0,47	-	Persen	86.105.600	9,49	-	Persen	399.777.637	44,07	92,5	Persen	499.075.419	55,01	92,50	Persen	989.258.656	109,04	Persen	93	Persen	97	Tersedianya Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
10.1	Sasaran : Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Alat Laboratorium	Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik	0,95	Persen	907.221.500	-	-	Persen	4.300.000	0,47	-	Persen	86.105.600	9,49	-	Persen	399.777.637	44,07	92,5	Persen	499.075.419	55,01	92,50	Persen	989.258.656	109,04	Persen	93	Persen	-	Tersedianya Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
10.1.1	Program : Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Persentase Pegawai yang memiliki Surat Keterangan Keahlian	20	Persen	907.221.500	-	-	Persen	4.300.000	0,47	-	Persen	86.105.600	9,49	-	Persen	399.777.637	44,07	90,00	Persen	499.075.419	55,01	90,00	Persen	989.258.656	109,04	Persen	90	Persen	450	Tersedianya Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
		Persentase Alat Laboratorium yang terkalibrasi	86	Persen	-	-	-	Persen	-	-	-	Persen	-	-	-	Persen	-	100,00	Persen	#DIV/0!	100,00	Persen	-	100,00	Persen	-	Persen	100	Persen	116	Tersedianya Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
		Persentase Alat Laboratorium yang dipelihara	86	Persen	-	-	-	Persen	-	-	-	Persen	-	-	-	Persen	-	100,00	Persen	#DIV/0!	100,00	Persen	-	100,00	Persen	-	Persen	100	Persen	116	Tersedianya Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
10.1.1.1	Kegiatan : Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai UPFD yang tersertifikat /terlatih	12	OK	30.000.000	-	-	OK	-	-	-	OK	691.000	2,30	-	OK	900.000	3,00	90	OK	44.096.400	146,99	90,00	OK	45.687.400	152,29	OK	90	OK	750	Tersedianya Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
10.1.1.1.1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	12	Orang	30.000.000	100	-	Orang	-	-	-	Orang	691.000	2,30	-	Orang	900.000	3,00	3	Orang	44.096.400	146,99	3,00	Orang	45.687.400	152,29	Orang	3	Orang	25	Tersedianya Dana Anggaran untuk Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan Sesuai	Agar dapat mengadakan Pelatihan di Provinsi Bengkulu	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
10.1.1.2	Kegiatan : Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diadakan	-	-	20.000.000	-	-	Persen	-	-	-	Persen	15.740.000	78,70	-	Persen	900.000	4,50	100	Persen	1.200.000	6,00	100,00	Persen	17.840.000	89,20	Persen	100	Persen	-	Tersedianya Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
10.1.1.2.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	Paket	20.000.000	100	-	Paket	-	-	-	Paket	15.740.000	78,70	-	Paket	900.000	4,50	3	Paket	1.200.000	6,00	3,00	Paket	17.840.000	89,20	Paket	3	Paket	300	Tersedianya Dana Anggaran untuk Pengadaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
10.1.1.3	Kegiatan : Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penambahan Alat Pemambahan Alat Laboratorium	84	Persen	626.100.000	-	-	Persen	-	-	-	Persen	33.683.600	5,38	-	Persen	382.377.637	61,07	100	Persen	402.763.269	64,33	100,00	Persen	818.824.506	130,78	Persen	100	Persen	119	Tersedianya Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
10.1.1.3.1	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2	Unit	626.100.000	100	-	Unit	-	-	-	Unit	33.683.600	5,38	-	Unit	382.377.637	61,07	2	Unit	402.763.269	64,33	2,00	Unit	818.824.506	130,78	Unit	2	Unit	100	Tersedianya Dana Anggaran untuk Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
10.1.1.4	Kegiatan : Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1	Jenis	99.989.300	-	-	Persen	-	-	-	Persen	23.091.000	23,09	-	Persen	900.000	0,90	100	Persen	7.485.500	7,49	100,00	Persen	31.476.500	31,48	Persen	100	Persen	10.000	Tersedianya Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
10.1.1.4.1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0	Laporan	49.989.300	100	-	Laporan	-	-	-	Laporan	23.091.000	46,19	-	Laporan	900.000	1,80	1	Laporan	7.485.500	14,97	1,00	Laporan	31.476.500	62,97	Laporan	1	Laporan	#DIV/0!	Tersedianya Dana Anggaran untuk Pengadaan Pelayanan Umum Kantor yang	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
10.1.1.4.2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	1	Laporan	50.000.000	100	-	Laporan	-	-	-	Laporan	-	-	-	Laporan	-	-	-	Laporan	-	-	-	Laporan	-	-	Laporan	-	Laporan	-	-	-	-	-
10.1.1.5	Kegiatan : Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Alat Laboratorium dan alat bantu yang terkalibrasi	20	Unit	131.132.200	-	-	Persen	4.300.000	3,28	-	Persen	12.900.000	9,84	-	Persen	14.700.000	11,21	100	Persen	43.530.250	33,20	100,00	Persen	75.430.250	57,52	Persen	100	Persen	500	Tersedianya Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Inkonsistensi antara dokumen perencanaan dengan penganggaran	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan	
10.1.1.5.1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	55	Unit	81.132.200	100	-	Unit	4.300.000	5,30	-	Unit	12.900.000	15,90	-	Unit	14.700.000	18,12	55	Unit	43.530.250	53,65	55,00	Unit	75.430.250	92,97	Unit	55	Unit	100	-	-	-	
10.1.1.5.2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	Unit	50.000.000	100	-	Unit	-	-	-	Unit	-	-	-	Unit	-	-	-	Unit	-	-	-	Unit	-	-	Unit	-	Unit	-	-	-	Tersedianya dana untuk pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung kantor atau Bangunan Lainnya yang	Agar Dana Anggaran untuk Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya Tetap di Angarkan

2.2 ANALISIS KINERJA PELAYANAN OPD

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, merupakan suatu Organisasi Perangkat Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Provinsi Bengkulu No.1 Tahun 2021 tanggal 7 September 2021 Tentang “Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu” yang kemudian mengalami perubahan kedua yaitu Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Bengkulu Dimana Dinas ini merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang dengan tipologi B yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas Eselon II/A yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur Bengkulu melalui Sekretaris Daerah.

Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi adalah unsur pelaksana Pemerintah Provinsi di Bidang Pekerjaan Umum yang mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan provinsi.

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dengan Tipologi B yang dipimpin Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas serta fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dibentuk organisasi yang mampu mendorong semua kegiatan dinas. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, kelembagaan, serta menginventarisir permasalahan persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretaris;
- b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas;
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain pada Dinas;
- e. Pelayanan informasi publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- f. Pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah;
- g. Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi kepala dinas;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala dinas

Sekretaris membawahi, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang - undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum, keuangan dan perlengkapan;
- b. Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan, sarana dan prasarana pada Dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
- f. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas;
- g. Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Pengumpulan data dan informasi dari bidang teknis di lingkungan Dinas;
- i. Pemutakhiran informasi publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- k. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- l. Perencanaan dan pengukuran rasionalisasi terhadap kebutuhan anggaran Dinas dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan;
- m. Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan di Dinas;
- n. Pengelolaan anggaran Dinas;
- o. Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- p. Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Dinas;
- q. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;

- r. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
- s. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sekretaris selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kelompok jabatan fungsional meliputi kelompok Sub – Substansi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

3. Bidang Sumber Daya Air

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
- c. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- d. Penyusunan pola pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- e. Penyusunan program pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- f. Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air;
- h. Menghadiri rapat teknis di bidang Sumber Daya Air;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;

- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sumber Daya membawahi :

1. Kepala Seksi Pelaksanaan

mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, menyiapkan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan provinsi;
- d. Persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan provinsi; dan
- f. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;

i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan

mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air dan izin perusahaan, penyelenggaraan alokasi air, penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;
- d. Pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
- e. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air dan izin perusahaan, penyelenggaraan alokasi air;
- f. Penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- g. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa;

- h. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan provinsi;
- i. Menghadiri rapat teknis operasi dan pemeliharaan;
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan meliputi Kelompok Sub-Substansi Perencanaan Sumber Daya Air.

4. Bidang Bina Marga

Dipimpin Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu, dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana tugas Bidang Bina Marga;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;
- c. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;
- d. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- e. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- g. Menghadiri rapat teknis bina marga;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;
- i. Penyusunan laporan tugas Bidang Bina Marga;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Bina Marga membawahi :

1. Kepala Seksi Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan
- f. Menghadiri rapat teknis pembangunan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Preservasi

Mempunyai tugas menyelenggarakan preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Preservasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Preservasi;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Preservasi;
- c. Pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- d. Penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;

- e. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
 - f. Pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
 - g. Menghadiri rapat teknis preservasi;
 - h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Preservasi;
 - i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Preservasi;
 - j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.
3. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Kepala Bidang Bina Marga meliputi kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

5. Bidang Cipta Karya

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan persampahan regional.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
- c. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi;
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional;
- f. Menghadiri rapat teknis cipta karya;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Cipta Karya membawahi :

1. Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum

Mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Minum lintas kabupaten/kota; mengembangkan Sistem dan mengelola persampahan regional; mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik Regional; mengelola dan mengembangkan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/ kota.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum;
- c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum lintas daerah kabupaten/kota;
- d. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- e. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
- f. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- g. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman
Mempunyai tugas menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di Kawasan strategis; menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi; menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis; menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas kabupaten/ kota.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- b. Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- c. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;

- d. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- e. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
- f. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- g. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota;
- h. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan penataan bangunan dan bangkitan;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi PelaksanaanPenataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- k. Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas meliputi kelompok Sub- Substansi Perencanaan dan Pengendalian.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan;

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- d. Pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- e. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- f. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- g. Pengembangan dan meningkatkan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- h. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;

- i. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi; peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- j. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota;
- l. Menghadiri rapat teknis jasa konstruksi;
- m. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi;
- n. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Jasa Konstruksi membawahi :

1. Kepala Seksi Pemberdayaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusun rencana pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis;
- d. Penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- e. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi;
- f. Menghadiri rapat teknis pemberdayaan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Pengawasan

Mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
- c. Pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan;

- d. Pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- f. Menghadiri rapat teknis pengawasan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas meliputi kelompok Sub-Substansi Pengaturan.

7. Bidang Tata Ruang

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan, tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan Kepala Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang; dan
- g. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
- h. Menghadiri rapat teknis tata ruang;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tata Ruang membawahi:

1. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan

Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang, melaksanakan

pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang, dan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- c. Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- e. Menghadiri rapat teknis pengaturan dan pembinaan;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

Mempunyai tugas melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, koordinasi dan pembinaan terhadap Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang, dan operasionalisasi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang;
- f. Pelaksanaan operasionalisasi PPNS penataan ruang;
- g. Menghadiri rapat teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas meliputi kelompok Sub- Substansi Pelaksanaan Penataan Ruang.

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai lembaga teknis harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

2.2 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

Dalam penyelenggaraan tugas tersebut, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berdasarkan Peraturan Gubernur Bengkulu Peraturan Gubernur Bengkulu Nomor 21 tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah dimana Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan daerah dengan Tipologi B yang dipimpin Kepala Dinas yang



berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Untuk melaksanakan tugas serta fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dibentuk organisasi yang mampu mendorong semua kegiatan dinas.

Tabel 2.2 berisikan kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam SPM, maupun terhadap IKK (terlampir).

Tabel 2.2

Capaian kinerja pelayanan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	8	8	10	10	11	12	13	14
1	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	-	-	58,64	58,64	58,15	57,25	59,87	62,82	62,83	63,83	
	Persentase penanganan Jalan Provinsi	-	-	0,97	2,33	1,56	3,69	4,09	2,83	2,96	1,00	
2	Presentase rumah tangga yang memiliki akses air minum layak	-	-	79,71	86,48	93,24	73,07	73,07	100	93,24	100	
	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan,	-	-	21,18	23,50	25,81	23,5	31,56	26,44	28,13	30,45	
	Presentase rumah tangga dengan akses air minum layak jaringan non perpipaan	-	-	58,53	62,98	67,43	49,57	41,51	73,56	71,87	76,31	
3	Presentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-	-	78,10	78,69	80,85	79,58	79,58	80	80,85	85	
	Presentase rumah tangga yang memiliki akses sanitasi layak	-	-	34,07	40,71	80,85	79,58	79,58	83,61	80,85	85	
4	Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik			17,39	17,39	13,63	9,09	13,63	36,36	21,74	26,09	
	Persenase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan			39,13	39,13	54,54	59,09	54,54	40,90	39,13	39,13	
	Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang			39,13	39,13	22,72	22,72	22,72	13,64	26,09	21,74	
	Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat			4,35	4,35	9,09	9,09	9,09	9,09	4,35	4,35	
	Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik			17,39	17,39	13,63	9,09	13,63	36,36	21,74	26,09	
	Persenase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Ringan			39,13	39,13	54,54	59,09	54,54	40,90	39,13	39,13	
	Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Sedang			39,13	39,13	22,72	22,72	22,72	13,64	26,09	21,74	
	Persentase Bangunan Gedung Strategis Dalam Kondisi Rusak Berat			4,35	4,35	9,09	9,09	9,09	9,09	4,35	4,35	
5	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	-	-	52,04	52,50	53,00	52,51	53	54,5	53,4	54,5	
	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi baik dan sedang	-	-	56,72	57,18	57,68	57,6	57,4	59,61	59,39	60,69	
	Persentase jaringan irigasi wewenang provinsi dalam kondisi Rusak	-	-	43,28	42,82	42,32	42,6	42,6	40,39	40,61	39,31	



No	Indikator Kinerja	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah			Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2026	
1	2	3	4	6	8	8	10	10	11	12	13	14
6	Persentase panjang sungai yang dinormalisasi/restorasi	-	-	0,42	1,13	1,72	1,13	1,13	1,33	0,50	0,50	
	Persentase Penanganan normalisasi sungai	-	-	0,42	1,13	1,00	0,44	0,046	1,33	0,5	0,5	
7	Cakupan pengembangan jasa konstruksi	-	-	100	100,00	100,00	100	100	100	100	100	
	Persentase Pelatihan yang dilaksanakan	-	-	100	100,00	100,00	100	100	100	100	100	
8	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	92	100,00	100,00	100	100	100	100	100	
	Terlaksananya Penyelenggaraan Penataan Ruang	-	-	92	100,00	100,00	100	100	100	100	100	
9	Persentase Alat Berat dan Alat Bantu Dalam Kondisi Baik	-	-	73	73,50	77,50	63,63	64	65	61	69	
	Persentase Alat Berat Dalam Kondisi Baik	-	-	77	78	80	75	87,5	90	70	80	
	Persentase Alat Bantu Dalam Kondisi Baik	-	-	69	69	75	33,33	33,33	33,33	33	66	
10	Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik			92	94	90	93	92,5	92,5	100	100	
	Persentase Alat Laboratorium Dalam Kondisi Baik			92	94	90	93	92,5	92,5	100	100	
11	Nilai Evaluasi SAKIP	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	
	Nilai Evaluasi SAKIP	-	-	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	BB	

2.3 TUGAS DAN FUNGSI ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN OPD

Untuk melaksanakan tugas serta fungsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dibentuk organisasi yang mampu mendorong semua kegiatan dinas. Berkenaan dengan hal tersebut diatas, maka organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu terdiri dari :

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang yang menjadi kewenangan Daerah Provinsi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:

- a. Perumusan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- c. Koordinasi penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- d. Peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- e. Pemantauan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- f. Pelaksanaan administrasi Dinas;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Gubernur di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang.

2. Sekretaris

Sekretaris mempunyai tugas mengarahkan penyusunan program kerja, mengelola urusan keuangan, kepegawaian, kelembagaan, serta menginventarisir permasalahan persuratan, kearsipan, rumah tangga, perlengkapan, dokumentasi dan informasi, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk melaksanakan tugas Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sekretaris;
- b. Penyusunan rencana program kerja dan anggaran belanja Dinas;
- c. Penyelenggaraan urusan tata usaha kantor, rumah tangga dinas, urusan perlengkapan dan urusan kepegawaian pada Dinas;
- d. Pengkoordinasian penyelenggaraan tugas Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan memberikan pelayanan administrasi kepada bidang-bidang lain pada Dinas;
- e. Pelayanan informasi publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- f. Pengkoordinasian identifikasi produk hukum daerah;
 - g. Pengkoordinasian dan pengidentifikasian permasalahan pada bidang dalam melaksanakan tugas fungsi serta pelaksanaan fasilitasi dalam penyelesaian permasalahan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - h. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai disposisi kepala dinas;
 - i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sekretariat;
 - j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sekretariat; dan
 - k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala dinas
- Sekretaris membawahi, yaitu :

1. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan

Mempunyai tugas mengelola administrasi persuratan, kearsipan, kepegawaian, perlengkapan, rumah tangga, dokumentasi, informasi, menghimpun peraturan perundang - undangan, mengidentifikasi kebutuhan produk hukum di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pengelolaan administrasi keuangan, perbendaharaan, mengkoordinasikan pelaksanaan anggaran.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas sub bagian umum, keuangan dan perlengkapan;
- b. Pengelolaan administrasi persuratan dan pengelolaan kearsipan;
- c. Pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. Perencanaan kebutuhan peralatan dan perlengkapan, pengkoordinasian pemeliharaan perlengkapan, perawatan, sarana dan prasarana pada Dinas;
- e. Pelaksanaan administrasi pencatatan aset dan barang milik negara maupun daerah;
- f. Penyiapan hal-hal yang berkenaan dengan rapat Dinas;
- g. Pendokumentasian pelaksanaan acara-acara pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- h. Pengumpulan data dan informasi dari bidang teknis di lingkungan Dinas;
- i. Pemutakhiran informasi publik di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- j. Penghimpunan peraturan perundang-undangan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;
- k. Pengidentifikasian kebutuhan produk hukum daerah dibidang pekerjaan umum dan penataan ruang;

- l. Perencanaan dan pengukuran rasionalisasi terhadap kebutuhan anggaran Dinas dalam mendukung pencapaian visi dan misi Dinas dan mengkoordinasikannya dengan Kepala Sub Bagian Perencanaan, Evaluasi dan Perencanaan;
- m. Penghimpunan dan penyusunan program pelaksanaan anggaran keuangan di Dinas;
- n. Pengelolaan anggaran Dinas;
- o. Penyusunan laporan fisik dan keuangan bulanan, triwulan, semester dan tahunan;
- p. Pelaksanaan rekap dan penyusunan laporan setoran Pendapatan Asli Daerah Dinas;
- q. Menghadiri rapat-rapat kedinasan sesuai dengan disposisi atasan;
- r. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan;
- s. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Sub Bagian Umum, Keuangan dan Perlengkapan; dan
- t. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kelompok jabatan fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Sekretaris selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas. Kelompok jabatan fungsional meliputi kelompok Sub – Substansi Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan.

3. Bidang Sumber Daya Air

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan pengelolaan sumber daya air di wilayah sungai yang meliputi perencanaan, pelaksanaan konstruksi, operasi dan pemeliharaan dalam rangka konservasi, dan pendayagunaan sumber daya air dan pengendalian daya rusak air pada sungai, pantai, bendungan, danau, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Bidang Sumber Daya Air menyelenggarakan Fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;

- c. Penyusunan konsep kebijakan pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- d. Penyusunan pola pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- e. Penyusunan program pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana kegiatan pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- f. Pelaksanaan pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air pada wilayah sungai;
- g. Pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan/penerapan pola pengelolaan Sumber Daya Air dan rencana pengelolaan Sumber Daya Air;
- h. Menghadiri rapat teknis di bidang Sumber Daya Air;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Sumber Daya membawahi :

1. **Kepala Seksi Pelaksanaan**

Mempunyai tugas menyusun rencana pelaksanaan kegiatan, pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan pemerintah daerah provinsi, menyiapkan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Pelaksanaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- c. Pelaksanaan konstruksi dan non konstruksi sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan

- air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan provinsi;
- d. Persiapan penyerahan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu dan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- e. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku serta konservasi sungai, pantai, tampungan air lainnya, air tanah, dan air baku yang menjadi urusan provinsi; dan
- f. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. **Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan**

Mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu, pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku, penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air dan izin perusahaan, penyelenggaraan alokasi air, penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan provinsi.

Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Seksi Operasi dan Pemeliharaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- c. Penyiapan bahan penyusunan rencana kegiatan operasi dan pemeliharaan, fasilitasi penerapan sistem manajemen mutu;

- d. Pengelolaan sistem hidrologi dan sistem peringatan dini, koordinasi pengelolaan Sumber Daya Air dan penyelenggaraan pemantauan dan pengawasan penggunaan sungai, pantai, bendungan, danau, situ, embung, dan tampungan air lainnya, irigasi, rawa, tambak, air tanah, dan air baku;
- e. Penyiapan rekomendasi teknis dalam pemberian izin penggunaan Sumber Daya Air dan izin usaha, penyelenggaraan alokasi air;
- f. Penyiapan pengendalian dan pengawasan pelaksanaan perencanaan teknik, persiapan pelaksanaan operasi dan pemeliharaan;
- g. Pelaksanaan operasi dan pemeliharaan, dan pelaksanaan penanggulangan kerusakan akibat bencana, fasilitasi penerapan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3), fasilitasi pengadaan barang dan jasa;
- h. Pelaksanaan pemberdayaan masyarakat di bidang operasi dan pemeliharaan, fasilitasi Tim Koordinasi Pengelolaan Sumber Daya Air (TKPSDA) pada Wilayah Sungai (WS) yang menjadi kewenangan provinsi;
- i. Menghadiri rapat teknis operasi dan pemeliharaan;
- j. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- k. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Operasi dan Pemeliharaan;
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. **Kelompok Jabatan Fungsional**

dipimpin oleh Kepala Bidang Sumber Daya Air selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan meliputi Kelompok Sub-Substansi Perencanaan Sumber Daya Air.

4. **Bidang Bina Marga**

Dipimpin Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyusunan perencanaan, pemograman, pelaksanaan pembangunan, dan preservasi jalan dan jembatan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan dan penerangan jalan umum, pengendalian mutu, dan hasil pelaksanaan pekerjaan serta penyediaan dan pengujian bahan dan peralatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Bina Marga menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana tugas Bidang Bina Marga;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;
- c. Pelaksanaan koordinasi pemrograman dan perencanaan teknik jalan, konektivitas sistem jaringan jalan dengan sistem moda transportasi;

- d. Pelaksanaan perencanaan teknik jalan, jembatan, penerangan jalan umum, peralatan, dan pengujian;
- e. Pelaksanaan pembangunan dan preservasi jalan dan jembatan, dan penerangan jalan umum; dan
- f. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi, audit keselamatan jalan dan jembatan serta leger jalan;
- g. Menghadiri rapat teknis bina marga;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga;
- i. Penyusunan laporan tugas Bidang Bina Marga;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Bina Marga membawahi:

1. Kepala Seksi Pembangunan

Mempunyai tugas melaksanakan dan mengendalikan konstruksi dan mutu pembangunan jalan dan jembatan, penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan, serta melaksanakan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pembangunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan;
- c. Pelaksanaan dan pengendalian konstruksi dan mutu pelaksanaan pembangunan jalan dan jembatan;
- d. Penyusunan dan pengembangan standar dokumen pengadaan, penyesuaian kontrak pekerjaan konstruksi jalan dan jembatan, penyusunan norma, standar, pedoman, dan kriteria bidang jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan laik fungsi jalan dan jembatan; dan
- f. Menghadiri rapat teknis pembangunan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pembangunan;
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Preservasi

Mempunyai tugas menyelenggarakan preservasi jalan dan jembatan, penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan, melaksanakan evaluasi

dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan, serta pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Preservasi menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Preservasi;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Preservasi;
- c. Pelaksanaan preservasi jalan dan jembatan;
- d. Penyesuaian kontrak pekerjaan preservasi jalan dan jembatan;
- e. Pelaksanaan evaluasi dan penetapan audit keselamatan jalan dan jembatan, bahan pengelolaan, pemantauan, dan evaluasi pemanfaatan peralatan dan bahan jalan, pengamanan pemanfaatan bagian-bagian jalan;
- f. Pelaksanaan pengujian peralatan, bahan, dan hasil pekerjaan preservasi;
- g. Menghadiri rapat teknis preservasi;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Preservasi;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Preservasi;
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

dipimpin oleh Kepala Bidang Bina Marga selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Kepala Bidang Bina Marga meliputi kelompok Sub-Substansi Perencanaan dan Evaluasi.

5. Bidang Cipta Karya

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi dan pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah serta pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dan persampahan regional.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Cipta Karya menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;

- c. Penyelenggaraan infrastruktur permukiman, bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungan pada kawasan strategis provinsi;
- d. Pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum dan sistem drainase lintas daerah;
- e. Pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik, dan persampahan regional;
- f. Menghadiri rapat teknis cipta karya;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Cipta Karya; dan
- i. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Cipta Karya membawahi:

1. Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum

Mempunyai tugas mengelola dan mengembangkan Sistem Pengelolaan Air Minum lintas kabupaten/kota; mengembangkan Sistem dan mengelola persampahan regional; mengelola dan mengembangkan Sistem Air Limbah Domestik Regional; mengelola dan mengembangkan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas kabupaten/ kota.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum;
- c. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Minum lintas daerah kabupaten/kota;
- d. Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional;
- e. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional;
- f. Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang terhubung langsung dengan sungai lintas daerah kabupaten/kota;
- g. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penyehatan Lingkungan Pemukiman dan Air Minum;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi; dan

j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman

Mempunyai tugas menyelenggarakan infrastruktur pada permukiman di Kawasan strategis; menetapkan bangunan gedung untuk kepentingan strategis provinsi; menyelenggarakan bangunan gedung untuk kepentingan strategis; menyelenggarakan penataan bangunan dan lingkungan di kawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas kabupaten/ kota.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- b. Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- c. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- d. Penyelenggaraan infrastruktur pada permukiman di kawasan strategis;
- e. Penetapan bangunan gedung untuk kepentingan strategis daerah provinsi;
- f. Penyelenggaraan bangunan gedung untuk kepentingan strategis;
- g. Penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungan dikawasan strategis dan penataan bangunan dan lingkungannya lintas daerah kabupaten/kota;
- h. Menghadiri rapat teknis pelaksanaan penataan bangunan dan bangkitan;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pelaksanaan;
- k. Penataan Bangunan dan Pengembangan Permukiman; dan
- l. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Cipta Karya selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas meliputi kelompok Sub- Substansi Perencanaan dan Pengendalian.

6. Bidang Jasa Konstruksi

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas menyelenggarakan pelaksanaan kebijakan di bidang pembinaan jasa konstruksi sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan;

Untuk melaksanakan tugas Kepala Bidang Jasa Konstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi;
- c. Pelaksanaan kegiatan pendataan proyek di daerah yang berpotensi dilakukan dengan skema kerjasama pemerintah dan badan usaha;
- d. Pengembangan dan meningkatkan kompetensi tenaga ahli konstruksi;
- e. Penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi;
- f. Pelaksanaan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan jasa konstruksi;
- g. Pengembangan dan meningkatkan kapasitas Badan Usaha Jasa Konstruksi;
- h. Pelaksanaan pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
- i. Pelaksanaan pembinaan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi tingkat Provinsi dan asosiasi; peningkatan kemampuan teknologi, penggunaan dan nilai tambah jasa dan produk konstruksi dalam negeri;
- j. Pengembangan pasar dan kerjasama konstruksi;
- k. Pelaksanaan pembinaan dan penerbitan izin usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil) di wilayah kabupaten/kota;
- l. Menghadiri rapat teknis jasa konstruksi;
- m. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi;
- n. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi; dan
- o. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Jasa Konstruksi membawahi :

1. Kepala Seksi Pemberdayaan

Mempunyai tugas menyiapkan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis, penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi dan menyelenggarakan system informasi jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Menyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan;
- c. Penyiapan bahan pembinaan, pelaksanaan pelatihan, bimbingan teknis;

- d. Penyuluhan dalam pelaksanaan dan pemberdayaan jasa konstruksi;
- e. Penyelenggaraan system informasi jasa konstruksi;
- f. Menghadiri rapat teknis pemberdayaan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pemberdayaan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Pengawasan

Mempunyai tugas memantau dan mengevaluasi pembinaan jasa konstruksi baik dalam hal pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengawasan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan
- c. Pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan;
- d. Pemantauan dan evaluasi pembinaan jasa konstruksi;
- e. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pembinaan serta untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan jasa konstruksi;
- f. Menghadiri rapat teknis pengawasan;
- g. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan;
- h. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Jasa Konstruksi selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas meliputi kelompok Sub-Substansi Pengaturan.

7. Bidang Tata Ruang

Dipimpin oleh Kepala Bidang yang bertugas melaksanakan penyiapan perumusan dan pelaksanaan pengaturan, perencanaan, tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pembinaan bidang penataan ruang sesuai dengan kewenangan pemerintah provinsi berdasarkan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan Kepala Bidang Tata Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;

- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;
- c. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pengaturan penataan ruang;
- d. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis bidang perencanaan tata ruang;
- e. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pemanfaatan ruang;
- f. Penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan pembinaan penataan ruang; dan
- g. Penyiapan bahan dan fasilitasi kerjasama penataan ruang;
- h. Menghadiri rapat teknis tata ruang;
- i. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;
- j. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang;
- k. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan Kepala Dinas.

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Bidang Tata Ruang membawahi:

1. Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan

Kepala Seksi mempunyai tugas melaksanakan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang, melaksanakan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang, dan evaluasi dan pelaporan terhadap tingkat pencapaian penyelenggaraan penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengaturan dan Pembinaan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- c. Pelaksanaan pengawasan teknis dan pengawasan khusus terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- d. Pelaksanaan pemantauan terhadap penyelenggaraan penataan ruang;
- e. Menghadiri rapat teknis pengaturan dan pembinaan;
- f. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan;
- g. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengaturan dan Pembinaan; dan
- h. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

2. Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;

Mempunyai tugas melaksanakan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, melaksanakan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang, koordinasi dan

pembinaan terhadap Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang, dan operasionalisasi Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) penataan ruang.

Untuk melaksanakan tugas Kepala Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- b. Penyiapan bahan-bahan dan data yang berkenaan dengan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- c. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penyidikan dan penertiban terhadap pelanggaran pemanfaatan ruang;
- e. Pelaksanaan koordinasi dan pembinaan terhadap PPNS penataan ruang;
- f. Pelaksanaan operasionalisasi PPNS penataan ruang;
- g. Menghadiri rapat teknis pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang;
- h. Pengevaluasian pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang;
- i. Penyusunan laporan pelaksanaan tugas Seksi Pengawasan dan Pengendalian Pemanfaatan Ruang; dan
- j. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan.

3. Kelompok Jabatan Fungsional.

Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Kepala Bidang Tata Ruang selaku Koordinator dan dibantu oleh Sub Koordinator yang bertanggungjawab kepada Kepala Dinas meliputi kelompok Sub- Substansi Pelaksanaan Penataan Ruang.

Permasalahan akan diuraikan berdasarkan aspek kajian untuk mengetahui faktor-faktor, baik secara internal maupun eksternal, yang menjadi pendorong munculnya permasalahan tersebut. Identifikasi permasalahan pada pelayanan skpd tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir dengan rincian yang dapat dilihat pada **tabel 2.3** dibawah ini :

Tabel 2.3

Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu

NO	Aspek Kajian	Capaian/Kondisi saat ini	Faktor yang mempengaruhi		Permasalahan Pelayanan SKPD
			Internal (Kewenangan SKPD)	Eksternal (Di Luar Kewenangan SKPD)	
1.	Persentase Rumah Tangga yang memiliki akses air minum layak	73,07%	Tidak cukupnya anggaran untuk mendukung Pembangunan SPAM Regional Kobema; Kewenangan provinsi untuk penanganan air bersih melalui SPAM Regional (lintas kabupaten/Kota).	Pembangunan sistem penyediaan air minum oleh pemerintah pusat dan swadaya masyarakat	Kewenangan penanganan lintas kabupaten/ kota atau regional sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014; Provinsi Bengkulu memfasilitasi untuk pembangunan SPAM regional untuk mengatasi kekurangan akses air bersih pada daerah rawan air di lintas kabupaten/kota sehingga masyarakat pada 3 kabupaten/kota tersebut dapat terlayani air bersih (air layak minum).

2.	Persentase Rumah Tangga Yyang memiliki akses sanitasi layak	79,58%	Tidak adanya anggaran untuk kegiatan yang mendukung kinerja sanitasi layak; Kewenangan provinsi pada cakupan layanan sitem pengelolaan air limbah (SPAL) pada sitem pengelolaan limbah regional seperti IPLT Komunal; Kewenangan Provinsi memfasilitasi pembangunan TPA Regional	Kementerian PUPR melalui Dirjen Cipta Karya memfasilitasi pembangunan baru pembangunan untuk saluran Induk dan Lateral Kewenangan; Pemerintah pusat memfasilitasi pembangunan TPA Regional tersebut	Kewenangan penanganan lintas kabupaten/ kota atau regional sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014; Belum sepenuhnya masyarakat yang terlayani sistem air limbah untuk memenuhi kapasitas IPAL Regional; Belum adanya TPA Regional yang difasilitasi oleh provinsi karena masih terkendala dengan lahan mana yang disepakati untuk pembangunan TPA regional Bengkulu tengah, Kota Bengkulu, dan Seluma.
3.	Persentase Jalan Provinsi dalam Kondisi Mantap	57,25%	Panjang Jalan Propinsi sepanjang 1.562,7 Km sesuai dengan Surat		Kewenangan penanganan hanya di jalan propinsi sesuai dengan Undang-undang 23 Tahun 2014 tentang Jalan di Urusan Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

			Keputusan Gubernur tentang SK jalan		
4.	Indeks Kinerja Sistem Irigasi	52,51	Daerah Irigasi yang menjadi kewenangan provinsi yaitu 1000 - 3000 Ha		Adanya dampak negatif dari perubahan iklim terhadap ketersediaan dan kualitas sumber daya air; Belum Optimalnya jaringan irigasi yang telah dibangun untuk mengairi sawah masyarakat; Masih sulitnya pembebasan lahan untuk pembangunan jaringan irigasi baik saluran primer ataupun saluran skunder; dan Belum terpenuhinya target penambahan air baku di Provinsi Bengkulu.
5.	Persentase Panjang Sungai yang di Normalisasi/Restorasi	0.423%	Ada 29 Daerah Aliran Sungai (DAS) di Provinsi Bengkulu dengan luas 83.305,21 Km ²		Belum adanya penanganan untuk normalisasi sungai seperti pengerasan dinding sungai, pembangunan sudetan, pembuatan tanggul dan juga pengerukan
6.	Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik	9,09%	Membangun dan Mengembangkan Gedung Strategis Provinsi berdasarkan Surat Keputusan tentang bangunan strategis provinsi		Belum di updatenya data gedung strategis propinsi dengan Surat Keputusan Gubernur

7.	Cakupan Pengembangan Jasa Konstruksi	100%	Penyelenggaraan Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI) dan Melatih tenaga ahli agar mempunyai sertifikat sesuai dengan bidang keahliannya		Masih dibutuhkannya peningkatan sarana dan prasarana pendukung Sistem Informasi Pembinaan Jasa Konstruksi (SIPJAKI)
8.	Terlaksananya Penyelenggaraan Tata Ryang	100%	Penyelenggaran Tata Ruang Provinsi melalui Perda RTRW Provinsi dan Rincian Kawasan Strategis Provinsi (KSP)		Revisi RTRW telah selesai dan segera di PERDA kan

2.4 Review Terhadap Rancangan Akhir (Ranhir) RKPD

Rencana Kerja (Renja) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tahun 2026 merupakan rencana kerja tahunan penjabaran dari pelaksanaan pembangunan yang telah direncanakan di dalam dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2021-2026. Rencana Kerja (Renja) ini disusun dengan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang RPJPD dan RPJMD, Serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dituntut untuk siap dan sanggup membuat/menyusun suatu perencanaan yang baik, sehingga dapat menyediakan sarana dan prasarana infrastruktur yang baik untuk mendukung kesejahteraan dan kemakmuran rakyat.

Review Berisikan uraian mengenai proses yang dilakukan yaitu membandingkan antara Rancangan Akhir (Ranhir) RKPD dengan hasil analisis kebutuhan, penjelasan mengenai alasan proses tersebut dilakukan, penjelasan temuan-temuan setelah proses tersebut dan catatan penting terhadap perbedaan dengan Rancangan Akhir (Ranhir) RKPD. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun usulan yang dimaksud dapat dilihat pada **tabel 2.4** dibawah ini.



Tabel 2.4

Reviu Terhadap Rancangan RKPD Tahun 2026 Provinsi Bengkulu

Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
A	Urusan : Dinas Pekerjaan Umum. Tujuan : Mewujudkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan serta mengoptimalkan pengelolaan tata ruang didukung oleh tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien				48.147.558.191,00	A	Urusan : Dinas Pekerjaan Umum. Tujuan : Mewujudkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan serta mengoptimalkan pengelolaan tata ruang didukung oleh tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisien				645.625.000.000,00
		Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Provinsi Bengkulu	1,80				Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI)	Provinsi Bengkulu	1,80	
		Nilai SAKIP OPD	Provinsi Bengkulu	BB				Nilai SAKIP OPD	Provinsi Bengkulu	BB	
	Sasaran : Meningkatnya Indeks Infrastruktur Dasar Meningkatnya Indeks Infrastruktur Strategis dan Konektivitas Wilayah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Infrastruktur Dasar	Provinsi Bengkulu	1,00	48.147.558.191,00	I	Sasaran : Meningkatnya Indeks Infrastruktur Dasar Meningkatnya Indeks Infrastruktur Strategis dan Konektivitas Wilayah Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien	Indeks Infrastruktur Dasar	Provinsi Bengkulu	1,00	645.625.000.000,00
		Indeks Infrastruktur Strategis dan Konektivitas Wilayah	Provinsi Bengkulu	2,60				Indeks Infrastruktur Strategis dan Konektivitas Wilayah	Provinsi Bengkulu	2,60	
		Nilai SAKIP OPD	Provinsi Bengkulu	BB				Nilai SAKIP OPD	Provinsi Bengkulu	BB	
I	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Provinsi Bengkulu	71,55	48.147.558.191,00	I	Program Penyelenggaraan Jalan	Tingkat Kemantapan Jalan	Provinsi Bengkulu	71,55	645.625.000.000,00
a	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik	Provinsi Bengkulu	911,00	48.147.558.191,00	a	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik	Provinsi Bengkulu	714,69 KM	645.625.000.000,00
		Jumlah Jembatan Provinsi dalam kondisi Baik	Provinsi Bengkulu	268,00				Jumlah Jembatan Provinsi dalam kondisi Baik	Provinsi Bengkulu		
		Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Sedang	Provinsi Bengkulu					Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Sedang	Provinsi Bengkulu		
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	1.200.000.000,00	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Dokumen	1.700.000.000,00
2	Pembinaan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		-	-	2	Pembinaan Lahan/Tanah untuk Penyelenggaraan Jalan	Luas Lahan yang Tersedia untuk Penyelenggaraan Jalan		-	-
3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1.330,12	1.300.000.000,00	3	Survey Kondisi Jalan/Jembatan	Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1330,116 KM	1.000.000.000,00
4	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,74	15.000.000.000,00	4	Pembangunan Jalan	Panjang Jalan yang Dibangun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		
5	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,74	15.000.000.000,00	5	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan yang Direkonstruksi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	80,7 KM	450.681.000.000,00
6	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,30	4.500.000.000,00	6	Rehabilitasi Jalan	Panjang Jalan yang Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,6 KM	4.650.000.000,00
7	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dilakukan Pemeliharaan Secara Berkala	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,10	5.150.000.000,00	7	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	22,24 KM	20.000.000.000,00
8	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9,20	12.698.000.000,00	8	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10,4 KM	15.000.000.000,00
9	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,00	6.000.000.000,00	9	Pembangunan Jembatan	Panjang Jembatan yang Dibangun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12 Meter	131.500.000.000,00
10	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125,00	1.207.766.652,00	10	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Panjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	125 Meter	3.000.000.000,00
11	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,40	1.091.791.539,00	11	Penanggulangan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang Jalan dan Jembatan yang Terehabilitasi/Terekonstruksi Akibat Bencana		-	
12	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,40	1.091.791.539,00	12	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi	Panjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	12,4 KM	18.094.000.000,00
II	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah tangga dengan akses air minum aman	Provinsi Bengkulu	21,40	4.900.000.000,00	II	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Rumah tangga dengan akses air minum aman	Provinsi Bengkulu	21,40	2.800.000.000,00
		Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Provinsi Bengkulu	28,42				Rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan	Provinsi Bengkulu	28,42	
		Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyuluran Air Minum	Provinsi Bengkulu	49,66				Persentase Peningkatan Kapasitas yang Terlayani melalui Penyuluran Air Minum	Provinsi Bengkulu	49,66	
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota (CIPTA KARYA)	Persentase akses masyarakat terhadap sistem penyediaan air minum	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		2.300.000.000,00	a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota (CIPTA KARYA)	Cakupan Rumah Tangga yang dilayani SPAM regional	Provinsi Bengkulu	12497 SR	200.000.000,00
1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optim alis asi SPAM Regional		-	-	1	Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Perbaikan SPAM	Jumlah Konsultasi Supervisi Pembangunan/Peningkatan/Perluasan/Optimalis asi SPAM Regional		-	-
2	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)		-	-	2	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan fasilitasi kerjasama penyelenggaraan SPAM		-	-
3	Pembinaan Teknis SDM dan Ketenagagaan Penyelenggaraan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan ketenagagaan penyelenggaraan SPAM Provinsi		-	-	3	Pembinaan Teknis SDM dan Ketenagagaan Penyelenggaraan SPAM Provinsi	Jumlah Kabupaten/Kota yang mendapatkan pembinaan ketenagagaan penyelenggaraan SPAM Provinsi		-	-
4	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara		-	-	4	Operasi dan Pemeliharaan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah unit SPAM yang beroperasi dan terpelihara		-	-
5	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota		-	-	5	Penyediaan Lahan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota	Luas Lahan yang Disediakan untuk Pengembangan SPAM Lintas Kabupaten/Kota		-	-
6	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Bengkulu Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400,00	2.100.000.000,00	6	Pembangunan Baru SPAM Jaringan Perpipaan	Kapasitas Pembangunan SPAM Regional		-	-
7	-	-	-	-	-	7	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	400 Liter/Desik	100.000.000,00
8	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	100.000.000,00	8	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab, Bengkulu Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00
9	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10,00	100.000.000,00	9	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Kabupate n/Kota	50.000.000,00



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
B	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota (UPTD SPAM REGIONAL KOBEKA)	Persentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan Kab/ Kota			2.600.000.000,00	B	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota (UPTD SPAM REGIONAL KOBEKA)	Cakupan Rumah Tangga yang dilayani SPAM regional		24000 SR	2.600.000.000,00
1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	2.500.000.000,00	1	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Unit	2.500.000.000,00
2	Fasilitas Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,00	50.000.000,00	2	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Kabupaten/ Kota	50.000.000,00
3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang diusulkan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang diusulkan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	50.000.000,00	3	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00
III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Bengkulu		35.000.000,00	III	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Bengkulu		35.000.000,00
a	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Provinsi Bengkulu		-	a	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pakaian Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya yang diadakan	Provinsi Bengkulu		-
1	Pengadaan Pakaian Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya untuk pekerja			-	1	Pengadaan Pakaian Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Pakaian Lapangan Beserta Atribut Kelengkapannya untuk pekerja			-
b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	Provinsi Bengkulu			b	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan	Provinsi Bengkulu		
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan				1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional yang dilaksanakan			
c	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diadakan	Provinsi Bengkulu		35.000.000,00	c	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Jumlah kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diadakan	Provinsi Bengkulu		35.000.000,00
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu tersedianya komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia			-	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jangka waktu tersedianya komponen Instalasi Listrik /Penerangan Bangunan Kantor yang tersedia			-
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu terlaksananya peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia			-	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jangka waktu terlaksananya peralatan dan Perlengkapan Kantor yang tersedia			-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,00	35.000.000,00	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Paket	35.000.000,00
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Provinsi Bengkulu		-	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang diadakan	Provinsi Bengkulu		-
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan			-	1	Pengadaan Mebel	Jumlah Mebel yang diadakan			-
2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan			-	2	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah Kendaraan Dinas/Operasional yang diadakan			-
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Bengkulu		-	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Bengkulu		-
1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			1	1	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor			
IV	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik	Provinsi Bengkulu	69,70	-	IV	Program Pengembangan Permukiman	Persentase Infrastruktur Permukiman dalam kondisi baik	Provinsi Bengkulu	69,70	-
a	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki MCK	Provinsi Bengkulu	481.453,00		a	Penyelenggaraan Infrastruktur pada Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Rumah Tangga yang memiliki MCK	Provinsi Bengkulu		
		Jumlah rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan air limbah (IPAL) komunal	Provinsi Bengkulu	51.993,00				Jumlah rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan air limbah (IPAL) komunal	Provinsi Bengkulu		
		Jumlah rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Provinsi Bengkulu	159.908,00				Jumlah rumah tangga yang terakses instalansi pengolahan Lumpur Tinja (IPLT)	Provinsi Bengkulu		
1	Pengawasan dan Pengendalian Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dilakukan pengawasan dan pengendalian	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dilakukan pengawasan dan pengendalian				1	Pengawasan dan Pengendalian Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dilakukan pengawasan dan pengendalian	Jumlah Sistem Jaringan Prasarana dan Sarana Permukiman di Kawasan Permukiman di Kawasan Strategis Daerah Provinsi yang dilakukan pengawasan dan pengendalian			
						V	Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	Kapasitas Pengolahan Sampah Terpadu (ton/hari)	Provinsi Bengkulu		9.650.000.000,00
						a	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional		Provinsi Bengkulu		9.650.000.000,00
						1	Pembangunan TPA/TPST/SPA	Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkulu Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	300 Ton/hari	100.000.000,00
						2	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun	Kab. Bengkulu Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	9.550.000.000,00
V	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi aman	Provinsi Bengkulu	10,65	150.000.000,00	VII	Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah	Persentase rumah tangga yang terakses sanitasi aman	Provinsi Bengkulu	10,65	100.000.000,00
		Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Provinsi Bengkulu	89,79				Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap sanitasi layak	Provinsi Bengkulu	89,79	
a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional		Provinsi Bengkulu		150.000.000,00	a	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional				100.000.000,00
1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	150.000.000,00	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
VI	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis yang layak fungsi	Provinsi Bengkulu	69,57	5.550.000.000,00	VI	Program Penataan Bangunan Gedung	Persentase Bangunan Gedung Strategis yang layak fungsi	Provinsi Bengkulu	69,57	10.100.000.000,00
		Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik	Provinsi Bengkulu	69,57				Persentase Bangunan Gedung Strategis dalam kondisi baik	Provinsi Bengkulu	69,57	
a	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung strategis yang ditingkatkan kualitasnya	Provinsi Bengkulu	3,00	5.550.000.000,00	a	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung strategis yang ditingkatkan kualitasnya	Provinsi Bengkulu	3 Unit	10.100.000.000,00
1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi				1	Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Perencanaan, Pembangunan, Pengawasan dan Pemanfaatan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi			
2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsua Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsua				2	Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsua Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Dilakukan Rehabilitasi, Renovasi dan Ubahsua			
3	Pengubahsuaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	5.000.000.000,00	3	Pengubahsuaan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Bangunan Gedung	10.000.000.000,00
4	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,00	200.000.000,00	4	Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 Dokumen	-
5	Pemeliharaan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	350.000.000,00	5	Pemeliharaan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Bangunan Gedung	100.000.000,00
VII	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Provinsi Bengkulu	13,04	400.000.000,00	VII	Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya	Persentase penataan bangunan dan lingkungan	Provinsi Bengkulu	13,04	-
a	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung strategis dan lingkungannya yang ditingkatkan kualitasnya	Provinsi Bengkulu	1,00	400.000.000,00	a	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah bangunan gedung strategis dan lingkungannya yang ditingkatkan kualitasnya	Provinsi Bengkulu	1 Unit	-
1	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	100.000.000,00	1	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang Disusun			
2	-	-				2	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	
3	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya				3	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Cagar Budaya dan Tradisional Bersejarah, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya			
4	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	300.000.000,00	4	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Kawasan	
						5	Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	
VIII	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Irigasi dalam kondisi baik dan sedang	Provinsi Bengkulu	56,50	11.300.000.000,00	VIII	Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)	Indeks Kinerja Irigasi dalam kondisi baik dan sedang	Provinsi Bengkulu	56,50	2.800.000.000,00
		Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Provinsi Bengkulu	48,33				Persentase Luas Layanan Irigasi Multikomoditas	Provinsi Bengkulu	48,33	
		Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Provinsi Bengkulu	12,96				Persentase Peningkatan Perlindungan Kawasan Permukiman Rawan Banjir	Provinsi Bengkulu	12,96	
		Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Provinsi Bengkulu	6,84				Persentase peningkatan Perlindungan Kawasan dari Abrasi dan Banjir Rob	Provinsi Bengkulu	6,84	
a	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha - 3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan jaringan irigasi dalam kondisi rusak	Provinsi Bengkulu	1,30	8.950.000.000,00	a	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha -3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan jaringan irigasi dalam kondisi rusak	Provinsi Bengkulu	0,5 Persen	2.550.000.000,00
		Persentase penanganan jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	Provinsi Bengkulu	1,30				Persentase penanganan jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	Provinsi Bengkulu	0,5 Persen	
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	500.000.000,00	1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	50.000.000,00
2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,80	2.000.000.000,00	2	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi	Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,2 KM	100.000.000,00
3	Rehabilitasi Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkulu Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	1.200.000.000,00	3	Rehabilitasi Bendung irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkulu Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Bendung	200.000.000,00
4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,80	1.000.000.000,00	4	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,2 KM	300.000.000,00
5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	40,00	3.000.000.000,00	5	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan	Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	15 KM	1.200.000.000,00
6	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Kab. Bengkulu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,00	600.000.000,00	6	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara	Kab. Bengkulu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Bendung	100.000.000,00
7	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkulu Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10,00	500.000.000,00	7	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa	Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkulu Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 KM	500.000.000,00
8	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	150.000.000,00	8	Operasional Unit Pengelola Irigasi	Jumlah Unit Pengelola Irigasi yang Difungsikan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
						9	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi	Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Lembaga	100.000.000,00
b	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	panjang sungai yang di normalisasi/restorasi	Provinsi Bengkulu	0,10	2.350.000.000,00	b	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sungai yang di normalisasi/ restorasi	Provinsi Bengkulu	0,1 Km	250.000.000,00
1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, Drainase Utama Perkotaan dan Pengaman Pantai	Jumlah Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun				1	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun			
2	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	1.500.000.000,00	2	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi	Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun			
3	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				3	Pembangunan Tanggul Sungai	Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,01 KM	25.000.000,00
4	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,10	400.000.000,00	4	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai	Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	0,1 KM	50.000.000,00
5						5	Operasi dan Pemeliharaan Bendungan	Jumlah Bendungan yang Dioperasikan dan Dipelihara			
6	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	200.000.000,00	6	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lembaga	100.000.000,00
7	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	100.000.000,00	7	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi			
8	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,00	100.000.000,00	8	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Lembaga	50.000.000,00
9	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10,00	50.000.000,00	9	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5 Dokumen	25.000.000,00
10	-	-	-	-	-	10	Operasi dan Pemeliharaan Sungai	Panjang Sungai yang Dioperasikan dan Dipelihara			-
11	-	-	-	-	-	11	Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi	Jumlah Dokumen Pengelolaan Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi			-
IX	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Presentase Ketersediaan data dan Informasi Jasa konstruksi	Provinsi Bengkulu	28.57	475.000.000,00	IX	Program Pengembangan Jasa Konstruksi	Presentase Ketersediaan data dan Informasi Jasa konstruksi	Provinsi Bengkulu	28.57	Persen
		Presentase Pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi	Provinsi Bengkulu	0,05				Presentase Pengawasan tertib pemanfaatan Jasa Konstruksi	Provinsi Bengkulu	0,05	Persen
		Presentase Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Provinsi Bengkulu	0,05				Presentase Pengawasan Tertib Usaha Jasa Konstruksi	Provinsi Bengkulu	0,05	Persen
		Presentase Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Provinsi Bengkulu	0,05				Presentase Pengawasan tertib Penyelenggaraan Jasa Konstruksi	Provinsi Bengkulu	0,05	Persen
a	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Provinsi Bengkulu	2,00	375.000.000,00	a	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Provinsi Bengkulu	2 Kali	150.000.000,00
1	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Dilatih	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	35,00	200.000.000,00	1	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Ahli yang Mengikuti Pelatihan			
2						2	Penyediaan Instruktur/Aesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Instruktur/Aesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	50.000.000,00
3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	20,00	100.000.000,00	3	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Lembaga	50.000.000,00
4	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	38,00	75.000.000,00	4	Facilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli	Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Orang	50.000.000,00
b	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan informasi jasa konstruksi	Provinsi Bengkulu	1,00	50.000.000,00	b	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan informasi jasa konstruksi	Provinsi Bengkulu	1 Layanan	25.000.000,00
1	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI				1	Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas administrator SIPJAKI	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan SIPJAKI			
2	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10,00	50.000.000,00	2	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi	Jumlah Dokumen Data dan Infomrasi Jasa Konstruksi Cakupan Provinsi yang Disediakan			
3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Orang	25.000.000,00	3	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI	Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	9 Orang	25.000.000,00
c	Kebijakan Khusus Terhadap Penyelenggaraan Jasa Konstruksi				50.000.000,00						-
1	Pembinaan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk Jasa Konstruksi	Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Produk	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6,00	50.000.000,00						
X	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan RTRW	Provinsi Bengkulu		400.000.000,00	X	Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	Penetapan RTRW	Provinsi Bengkulu		225.000.000,00
		Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Provinsi Bengkulu					Pengenaan Sanksi Administratif Pelanggaran Pemanfaatan Ruang	Provinsi Bengkulu		
		Facilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi Bengkulu					Facilitasi Kegiatan Sekretariat PPNS Penataan Ruang di Daerah	Provinsi Bengkulu		
		Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis peraliran pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke	Provinsi Bengkulu					Pelaksanaan monitoring dan evaluasi materi teknis peraliran pesisir yang disetujui MKP untuk diintegrasikan ke	Provinsi Bengkulu		
		Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Provinsi Bengkulu					Penyelesaian Materi Teknis RTRW	Provinsi Bengkulu		



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
a	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Persentase Terlaksananya Perencanaan Penataan ruang	Provinsi Bengkulu		100.000.000,00	a	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	Jumlah dokumen Koordinasi dan sinkronisasi	Provinsi Bengkulu		100.000.000,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Provinsi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota			
2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota				2	Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW dan RRTR Kabupaten/Kota			
3	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000,00	3	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	100.000.000,00
b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Provinsi Bengkulu	1,00	300.000.000,00	b	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Provinsi Bengkulu	1 Laporan	125.000.000,00
1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi dan Pembangunan Daerah				1	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi			
2	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	200.000.000,00	2	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang	Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	100.000.000,00
3	Pelaksanaan Sinkronisasi Program pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	100.000.000,00	3	Pelaksanaan Sinkronisasi Program pemanfaatan Ruang	Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Provinsi Bengkulu	-	-	c	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Provinsi Bengkulu	-	-
1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang				1	Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang	Jumlah Dokumen Koordinasi Pelaksanaan Penataan Ruang			
2	Operasionalisasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (ppns) bidang penataan ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang				2	Operasionalisasi tugas dan fungsi penyidik pegawai negeri sipil (ppns) bidang penataan ruang	Jumlah Kasus yang Ditangani Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataan Ruang			
XI	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Alat Berat dan Alat Bantu dalam kondisi baik	Provinsi Bengkulu	81,50	235.000.000,00	XI	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Alat Berat dan Alat Bantu dalam kondisi baik	Provinsi Bengkulu	81,50	285.000.000,00
		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Provinsi Bengkulu	100,00				Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Provinsi Bengkulu	100,00	
a	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai UPTD yang mengikuti Pelatihan Surat Izin Operator	Provinsi Bengkulu	-	-	a	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai UPTD yang mengikuti Pelatihan Surat Izin Operator	Provinsi Bengkulu	-	-
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai				1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai			
b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum perangkat Daerah yang tersedia	Provinsi Bengkulu	1,00	35.000.000,00	b	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum perangkat Daerah yang tersedia	Provinsi Bengkulu	1 Jenis	35.000.000,00
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	35.000.000,00	1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	35.000.000,00
c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Alat Berat dan Alat Bantu yang memiliki surat izin laik operasi	Provinsi Bengkulu	10,00	-	c	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Alat Berat dan Alat Bantu yang memiliki surat izin laik operasi	Provinsi Bengkulu	-	-
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1,00	-	1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-
d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alat Berat dan Alat Bantu yang dipelihara	Provinsi Bengkulu	85,00	200.000.000,00	d	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Alat Berat dan Alat Bantu yang dipelihara	Provinsi Bengkulu	85 Persen	250.000.000,00
1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1,00		1	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10,00	200.000.000,00	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	10 Unit	250.000.000,00
e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Alat Berat dan alat bantu	Provinsi Bengkulu	-	-	e	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penambahan Alat Berat dan alat bantu	Provinsi Bengkulu	-	-
1	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan				1	Pengadaan Alat Besar	Jumlah Unit Alat Besar yang Disediakan			
XII	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Alat Laboratorium dalam kondisi baik	Provinsi Bengkulu	92,6	315.000.000,00	XII	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Alat Laboratorium dalam kondisi baik	Provinsi Bengkulu	92,6	215.000.000,00
		Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Provinsi Bengkulu	100				Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Provinsi Bengkulu	100	
a	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Bengkulu	3,00	15.000.000,00	a	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Provinsi Bengkulu	3 orang	15.000.000,00
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,00	15.000.000,00	1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3 orang	15.000.000,00
b	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Bengkulu	55,00	250.000.000,00	b	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Provinsi Bengkulu	55 unit	150.000.000,00
1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55,00	250.000.000,00	1	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	55 Unit	150.000.000,00
2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			
c	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Bengkulu	1,00	50.000.000,00	c	Administrasi Umum dan Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Provinsi Bengkulu	1 paket	50.000.000,00
		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1,00				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 paket	
1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			
2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		-	-
3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	50.000.000,00	3	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	50.000.000,00
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penambahan Alat Penambahan Alat Laboratorium	Provinsi Bengkulu	-	-	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penambahan Alat Penambahan Alat Laboratorium	Provinsi Bengkulu	-	-
1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			



Rancangan Awal RKPD							Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif		No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7		8	9	10	11	12	13
2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					2	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			
3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan lainnya yang Disediakan					3	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Bengkulu		-		e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Bengkulu		-
1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					1	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	
2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan					2	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			
XIII	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Provinsi Bengkulu	100,00	34.620.765.520,00		XIII	Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase Penunjang Urusan Perangkat Daerah	Provinsi Bengkulu	100,00	27.823.391.800,00
a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun	Provinsi Bengkulu	7,00	575.000.000,00		a	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun	Provinsi Bengkulu	7 Dokumen	475.000.000,00
1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,00	150.000.000,00		1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Dokumen	350.000.000,00
2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4,00	150.000.000,00		2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	50.000.000,00
3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa		100.000.000,00		3	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	50.000.000,00
4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	5,00	100.000.000,00		4	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	4 Data	25.000.000,00
5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	75.000.000,00		5	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			
b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		5,00	27.935.765.520,00		b	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Provinsi Bengkulu	5 Jenis	23.983.391.800,00
1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		3.990,00	27.485.765.520,00		1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2800 Orang/ Bulan	23.716.471.800,00
2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	300.000.000,00		2	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	226.920.000,00
3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	50.000.000,00		3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	20.000.000,00
4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa				4	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	100.000.000,00		5	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	20.000.000,00
c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Provinsi Bengkulu	2,00	275.000.000,00		c	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	Provinsi Bengkulu	2 Jenis	50.000.000,00
1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	25.000.000,00		1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	25.000.000,00
2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	150.000.000,00		2	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		1 Laporan	
3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	100.000.000,00		3	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	25.000.000,00
d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Bengkulu	15,00	75.000.000,00		d	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	Provinsi Bengkulu	15 Orang	-
1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	8,00	75.000.000,00		1	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			
e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diadakan	Provinsi Bengkulu	4,00	1.090.000.000,00		e	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diadakan	Provinsi Bengkulu	4 Jenis	335.000.000,00
1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	3,00	400.000.000,00		1	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Paket	100.000.000,00
2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	75.000.000,00		2	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Paket	25.000.000,00
3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	50.000.000,00		3	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Dokumen	10.000.000,00
4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	550.000.000,00		4	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	200.000.000,00
5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	15.000.000,00		5	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			
f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		Provinsi Bengkulu		825.000.000,00		f	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang diadakan	Provinsi Bengkulu		15.000.000,00
1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	115.000.000,00		1	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Provinsi Bengkulu	1 Paket	5.000.000,00
2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	150.000.000,00		2	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	10.000.000,00
3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	560.000.000,00		3	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			
g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Bengkulu	3,00	2.745.000.000,00		g	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Bengkulu	3 Jenis	2.565.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	25.000.000,00		1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	5.000.000,00
2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2,00	720.000.000,00		2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	2 Laporan	670.000.000,00
3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	2.000.000.000,00		3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Laporan	1.890.000.000,00



Rancangan Awal RKPD						Hasil Analisis Kebutuhan					
No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif	No	Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target Capaian	Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	7	8	9	10	11	12	13
h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Bengkulu	77,00	1.100.000.000,00	h	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Provinsi Bengkulu	77 Persen	400.000.000,00
1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel	34,00	500.000.000,00	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	24 Unit	350.000.000,00
2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	36,00	200.000.000,00	2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	6 Unit	25.000.000,00
3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1,00	400.000.000,00	3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	1 Unit	25.000.000,00

2.5 PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Dalam menyusun program dan kegiatan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu perlu mengkaji dan menggali usulan – usulan dari para pemangku kepentingan, baik dari kelompok masyarakat, LSM, Asosiasi – Asosiasi, Perguruan Tinggi maupun dari OPD Kabupaten/Kota yang langsung ditujukan kepada OPD Provinsi dari penelitian lapangan dan pengamatan pelaksanaan musrenbang kabupaten kota berdasarkan skala prioritas dengan tidak mengabaikan tugas pokok dan fungsi (tupoksi) serta wewenang Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai OPD Teknis di Pemerintah Daerah Provinsi Bengkulu.

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat berawal dari hasil usulan pada Musyawarah Perencanaan Desa, Kecamatan, Kabupaten/Kota sampai ke tingkat Provinsi. Usulan Program Kegiatan ini direkap langsung oleh Bappeda dimana sebelumnya telah dilakukan pembahasan antara Kabupaten/Kota dengan Organisasi Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Provinsi Bengkulu. Usulan itu kemudian di rekap dan di pilih berdasarkan skala prioritas dan juga yang menjadi kewenangan provinsi Bengkulu.

Sebelum pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Provinsi, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu melaksanakan Rapat Sinkronisasi Program Bidang Ke PU-an yang dihadiri 10 Kabupaten/Kota. Berkaitan dengan hal tersebut, adapun usulan yang dimaksud dapat dilihat pada **tabel 2.5** dibawah ini.

Tabel 2.5

Usulan Program dan Kegiatan Kabupaten/Kota Tahun 2026

No	Nama Usulan	Lokasi	Kabupaten	Keterangan
1	Penanganan ruas jalan SP.Gunung Selan	Lais	Bengkulu Utara	
2	Penanganan ruas Jalan Kerkap - Lubuk Durian		Bengkulu Utara	
3	Penanganan Jembatan dan Jalan Kabupaten		Bengkulu Utara	3 Jembatan ,2 Jalan
4	Rehabilitasi Bendung DI Air Buso		Bengkulu Utara	1 Bendung
5	Penanganan ruas Jalan Penarik Lubuk Pinang	Desa Lubuk Sahung	Kabupaten Muko-Muko	2 KM
6	Penanganan ruas Jalan Penarik Lubuk Pinang	Kecamatan Teras Terunjam	Kabupaten Muko-Muko	4 KM
7	Penanganan ruas Jalan Penarik Lubuk Pinang	Lima Koto		
8	Penanganan ruas Jalan Lubuk Gedang- SP IV (Agung Jaya) - SP. III (Selagan Jaya) Lokasi SP 6 depan Pasar		Kabupaten Muko-Muko	
9	Penanganan Jalan Mukomuko- Dusun Gedang- SP. Yamaja (Pondok Kopi)		Kabupaten Muko-Muko	± 9 KM
10	Penanganan ruas Jalan Baru Bukit Kayu Menang Ruas Jalan Penarik Lubuk Pinang		Kabupaten Muko-Muko	Pemotongan Tebing dan Bukit Curam
11	Penanganan Jembatan Pondok Batu		Kabupaten Muko-Muko	Pembangunan Jembatan
12	Penanganan Jembatan Tanah Rekah		Kabupaten Muko-Muko	Peningkatan Jembatan
13	Penanganan Jembatan Teras Terunjam		Kabupaten Muko-Muko	Rehabilitasi Jembatan
14	Pembangunan Bangunan Gedung Milik Provinsi	Teluk Rumbia	Kabupaten Muko-Muko	3 Unit Rehabilitasi
15	Penanganan Tanggul Pipa PDAM	Selagan Raya	Kabupaten Muko-Muko	
16	Pembangunan SPAM	1. Desa Bandar Jaya, Desa Bukit Harapan, Desa Semambung Makmur	Kabupaten Muko-Muko	3 Unit
17	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Citandui		Kota Bengkulu	
18	Pelebaran Jalan Ruas Jalan Sungai Hitam- Pasar Bengkulu		Kota Bengkulu	
19	Pelebaran Jalan dari Simpang Pagar Dewa- Padang Jati		Kota Bengkulu	
20	Penanganan ruas Nasional WR Supratman-SP.DPRD Kota		Kota Bengkulu	
21	Pelebaran Jembatan	Jalan Jenggalu dekat tapak jedah	Kota Bengkulu	
22	Pembangunan Perbatasan kota dengan Kabupaten		Kota Bengkulu	Tinggi 30 Meter
23	Pembangunan Drainase	Jalan Kalimantan	Kota Bengkulu	
24	Penanganan Jembatan Kota	Padang Serai	Kota Bengkulu	20 Meter
25	Penanganan Jembatan Kecil di Tugu Hiu - SP.Kroya		Benteng	1 Unit
26	Pemeliharaan Rutin Jalan Provinsi		Benteng	5 Ruas
27	Pelebaran dan Pembangunan Jalan talang tengah II-Talang Leteng		Benteng	
28	Pemeliharaan Jembatan Ruas Lubuk Sini-Bts. Utara		Benteng	1 Jembatan
29	Normalisasi Sungai di DI Air Rindu Hari		Benteng	
30	Rekonstruksi Jalan Kepahiang-Bts		Kepahiang	
31	Pelebaran Jalan Kabawetan		Kepahiang	

RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU



No	Nama Usulan	Lokasi	Kabupaten	Keterangan
32	Penanganan Jalan Kabupaten Di usulkan ke Provinsi		Kepahiang	
33	Penanganan 13 DI		Kepahiang	
34	Perencanaan SPAM regional		Kepahiang	
35	Penanganan dua titik longsor ruas weskus- ratu agung		Kepahiang	
36	pembebasan lahan	jembatan kampung bogor	Kepahiang	
37	Penanganan Jembatan	Desa Balai buntar	Rejang lebong	
38	Penanganan Jembatan dengan Plat deker lama	Ruas PUT-Kota Padang-Derati-Tanjung Ening	Rejang lebong	
39	Pemeliharaan Tebas Bayang	Desa Aour, Beringin III-bengko	Rejang lebong	
40	Menangani masalah banjir	Ruas Jalan A.K Gani	Rejang lebong	
41	Perbesaran ruas jalan	A.K Ghani	Rejang lebong	
42	Pemeliharaan//Rekonstruksi Jalan Pasar Bawah Manggul		Bengkulu Selatan	
43	Penanganan Jembatan Duayu		Bengkulu Selatan	
44	Pelebaran ruas jalan kolonel berlian		Bengkulu Selatan	
45	Penanganan titik longsor dan perlu penanganan di ruas jalan klutum		Bengkulu Selatan	
46	Pemeliharaan DI air Selebang		Bengkulu Selatan	
47	Penanganan Jembatan Sekunyit di ruas jalan Sp. Kurawan		Bengkulu Selatan	1 Unit
48	Rehabilitasi Bendung Air Selebang Kedurang		Bengkulu Selatan	2 Unit pintu intake dan 1 pintu penguras bendung
49	Pemasangan Lampu jalan pada ruas jalan provinsi		Bengkulu Selatan	
50	Penanganan Ruas Padang Capo		Kabupaten Seluma	
51	Penanganan Ruas Pering Baru titik rawan banjir		Kabupaten Seluma	
52	Penanganan Ruas Jalan Sendawar- Maras membuat penahan abrasi (Pelapis tebing)		Kabupaten Seluma	
53	Penanganan Jembatan Ulu talo di air Keruh dan jembatan cengri		Kabupaten Seluma	
54	Normalisasi dan pemasangan beronjong	Desa Cawang	Kabupaten Seluma	
55	Penanganan Ruas Jalan Provinsi Tanjung Kemuning Rusak Berat		Kaur	18 KM
56	Penanganan Ruas Jalan Tugu Utara-Padang Leban dan Jembatan nya		Kaur	
57	Penanganan Ruas Jalan Sp. Tanjung Iman-Muara Shung		Kaur	28 KM
58	Pemeliharaan Rutin ruas jalan muara sahung	Tanjung Kemuning	Kaur	
59	Pembangunan DI Kule yang tidak berfungsi selama 5 tahun		Kaur	
60	Pernaikan Drainase Tanjung Iman- Muara Shung		Kaur	
61	Pemeliharaan berkala di Ludai		Kaur	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus:

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

3.2 TUJUAN DAN SASARAN RENJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG PROVINSI BENGKULU

Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang tertuang pada Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2026 - 2030, maka perlu dijabarkan Tujuan dan Sasaran. Tujuan dan sasaran adalah tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan indikator kinerja OPD selama lima tahun. Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sedangkan Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran akan memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi OPD atau kelompok sasaran yang dilayani, serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja.

Adapun Tujuan dan Sasaran dalam Rancangan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu tahun 2026 – 2030 dapat dijabarkan sebagai berikut :

- Tujuan :

Mewujudkan akses masyarakat terhadap infrastruktur yang terpadu, berkelanjutan serta mengoptimalkan pengelolaan tata ruang didukung oleh tata kelola perangkat daerah yang efektif dan efisiensi.

Adapun Indikator untuk mencapai tujuan ada 2 (dua), yaitu :

1. Indeks Pembangunan Infrastruktur (IPI);
2. Nilai SAKIP OPD

Untuk mencapai tujuan perlu adanya sasaran yang mendukung, adapun sasaran dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu yaitu :

- Sasaran :
 1. Meningkatnya Indeks Infrastruktur Dasar;
 2. Meningkatnya Indeks Infrastruktur Strategis dan Konektivitas Wilayah;
 3. Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif dan Efisien.

Gambar 3.1

Perumusan Tujuan Dan Sasaran Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Propinsi Bengkulu



3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

3.3.1 Pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi dan Misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2026 - 2030 merupakan cakupan dari seluruh visi dan misi RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025 – 2030 yang dapat ditinjau dari aspek ekonomi, sumber daya manusia, sumber daya alam, lingkungan hidup, infrastruktur dasar dan mitigasi bencana serta pemerintah yang professional dan akuntabel. Hal ini menunjukkan bahwa Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan pemerataan pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang ada di provinsi Bengkulu secara berkesinambungan mengacu pada RPJMD Provinsi Bengkulu.

Sejalan dengan hal tersebut Adapun Visi pembangunan Provinsi Bengkulu dalam RPJMD tahun 2025 - 2029 sebagai berikut : **"BENGKULU MAJU YANG RELIGIUS, SEJAHTERA DAN BERKELANJUTAN"** Visi ini mencerminkan komitmen pemerintah daerah untuk menjadikan Bengkulu sebagai provinsi yang tumbuh dan berkembang dalam berbagai aspek kehidupan. Hal tersebut mencakup penghayatan akan nilai-nilai religius, pencapaian kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat, serta pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan. Ini menunjukkan upaya untuk mencapai keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan harmonisasi sosial dalam masyarakat. Adapun pokok-pokok visi pembangunan dalam RPJMD Provinsi Bengkulu Tahun 2025-2029 untuk mencapai:

1. **BENGKULU MAJU**

Provinsi Bengkulu telah mencapai tingkat pendapatan perkapita yang signifikan dalam GNI perkapita, kontribusi PDN Maritim, kontribusi PDB manufaktur dan berbagai aspek termasuk ekonomi, infrastruktur, sumber daya manusia, inovasi dan teknologi, serta kualitas hidup masyarakat;

2. **RELIGIUS**

Setiap warga Bengkulu memiliki sikap dan perilaku yang taat terhadap nilai-nilai agama, toleran dan hidup rukun;

3. **SEJAHTERA**

Terpenuhinya kebutuhan hidup yang layak secara ekonomi, tingkat pendidikan yang memadai, derajat kesehatan yang baik sehingga warga Bengkulu dapat hidup layak secara fisik maupun non fisik;

4. **BERKELANJUTAN**

Upaya yang terencana dalam memadukan aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi untuk menciptakan warga provinsi Bengkulu yang bahagia.

Adapun Misi untuk mewujudkan Visi Provinsi Bengkulu Maju Religius , Sejahtera dan Berkelanjutan, maka Misi yang diemban Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu lima tahun ke depan yang menjadi pedoman dalam pembangunan Provinsi Bengkulu adalah:

Misi II yaitu Mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta konektivitas wilayah guna mendukung pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Misi kedua dilaksanakan dengan mempercepat ketersediaan infrastruktur dasar dan strategis serta meningkatkan konektivitas wilayah guna mendukung pembangunan yang merata dan berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut dilakukan Upaya peningkatan ketersediaan dan kualitas infrastruktur yang dibagi pada dua fokus utama yaitu meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur dasar dan meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur strategis serta konektivitas wilayah.

Sebagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola infrastruktur pekerjaan umum, berperan agar infrastruktur di provinsi Bengkulu dilaksanakan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan dan sesuai dengan tata ruang, dalam kondisi yang mantap melalui :

1. Perwujudan peningkatan kualitas Jaringan jalan dan jembatan Provinsi sebagai distribusi lalu – lintas barang dan manusia;
2. Perwujudan pembangunan jaringan irigasi untuk ketahanan pangan;
3. Penyediaan pelayanan infrastruktur dasar air minum dan sanitasi lintas kabupaten kota (regional) dan di kawasan strategis provinsi.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

4.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan

Untuk menunjang perwujudan visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu, dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 serta prakiraan maju tahun 2027 direalisasikan melalui program dan kegiatan yang dapat dilihat pada **tabel 4.1** dibawah ini.

PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG PROVINSI BENGKULU TAHUN 2026																
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG						696.698.391.800,00							701.100.400.450,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						696.698.391.800,00							701.100.400.450,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						696.698.391.800,00							701.100.400.450,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Persentase Dokumen perencanaan, penganggaran, pelaporan dan evaluasi yang disusun	-			100 Persen	27.823.391.800,00						-	41.707.600.450,00	
	1.03.01.1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan yang disusun	-			7 Dokumen	475.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
			Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				4 Dokumen	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		450.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD														
			Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				2 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah														
			Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				1 Laporan	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Penguat bangun Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.01.0008	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Dipeniksa Lingkup Perangkat Daerah				4 Data	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	-			5 Jenis	23.983.391.800,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	32.957.600.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.1.02.0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				2800 Orang/ Bulan	23.716.471.800,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		32.377.600.450,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.1.02.0003		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				1 Dokumen	226.920.000,00	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.1.02.0005		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD														
			Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				1 Laporan	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.1.02.0008		Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran														
			Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran				1 Dokumen	20.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah yang disusun	-			2 Jenis	50.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	425.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.1.03.0001		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD														
			Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.01.1.03.0005		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.03.0006	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD														
			Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD				1 Laporan	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah ASN yang ditingkatkan kapasitasnya	-			15 Orang	0,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				0 Orang	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah jenis Administrasi Umum Perangkat Daerah yang diadakan	-			4 Jenis	335.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.375.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				1 Paket	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan				1 Dokumen	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				1 Laporan	200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DAHA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-			-	15.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				0 Unit	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				1 Paket	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				1 Unit	10.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah jenis Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			3 Jenis	2.565.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	4.280.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	5.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		30.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				2 Laporan	670.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1.890.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan rutin/berkala Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-			77 Persen	400.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	1.370.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya				24 Unit	350.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		600.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				6 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.01.1.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		670.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
2.	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Penanganan normalisasi sungai	-			0,2 Persen	2.800.000.000,00						-	20.300.000.000,00	
	1.03.02.1.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Panjang sungai yang di normalisasi/ restorasi	-			0,1 Km	250.000.000,00			-	2. Pengembangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Bengkulu	-	6.250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.01.0009	Pembangunan Tanggul Sungai														
			Panjang Tanggul Sungai yang Dibangun				0,01 KM	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Bengkulu		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.01.0075	Koordinasi dan Sinkronisasi Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Ditingkatkan Kapasitasnya melalui Koordinasi dan Sinkronisasi				2 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Bengkulu		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.01.0087	Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				5 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Bengkulu		50.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.01.0090	Pembinaan dan Pemberdayaan Kelembagaan Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Lembaga Pengelolaan Sumber Daya Air Kewenangan Provinsi yang Dibina dan Diberdayakan				2 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Bengkulu		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.01.0107	Operasi dan Pemeliharaan Tanggul dan Tebing Sungai														
			Panjang Tanggul dan Tebing Sungai yang Dipelihara				0,1 KM	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Bengkulu		400.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.01.0117	Penyusunan Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi														

RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Pola dan Rencana Pengelolaan SDA WS Kewenangan Provinsi yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr- astruktur yang Tangguh dan Berkel- anjutan serta Perluasan Konektivita- s untuk Pe- merataan	Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Bengkulu		2.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.01.0122	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr- astruktur yang Tangguh dan Berkel- anjutan serta Perluasan Konektivita- s untuk Pe- merataan	Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Bengkulu		500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.01.0136	Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi														
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Sistem Hidrologi dan Kualitas Air Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi				0 Dokumen	0,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr- astruktur yang Tangguh dan Berkel- anjutan serta Perluasan Konektivita- s untuk Pe- merataan	Wilayah Sungai Kewenangan Provinsi Bengkulu		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL					DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.02.1.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya 1000 Ha-3000 Ha dan Daerah Irigasi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penanganan jaringan irigasi dalam kondisi rusak Persentase penanganan jaringan irigasi dalam kondisi baik dan sedang	-			0.5 Persen 0,5 Persen	2.550.000.000,00			Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bengkulu	-	14.050.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.02.0014	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Permukaan														
			Parjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Direhabilitasi				0,2 KM	100.000.000,00	Kab. Rejang Labong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, menge mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bengkulu		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.02.0015	Rehabilitasi Bendung Irigasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Bendung Irigasi yang Direhabilitasi</i>				1 Bendung	200.000.000,00	Kab. Bengkulu Selatan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkulu Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan serta Perluasan Konektivitas untuk Pemerataan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bengkulu		3.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.02.0016	Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa														
			<i>Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Direhabilitasi</i>				0,2 KM	300.000.000,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan serta Perluasan Konektivitas untuk Pemerataan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bengkulu		2.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.02.0021	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Permukaan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dioperasikan dan Dipelihara				15 KM	1.200.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bengkulu		3.500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.02.0022	Operasi dan Pemeliharaan Bendung Irigasi														
			Jumlah Bendung Irigasi yang Beroperasi dan Dipelihara				1 Bendung	100.000.000,00	Kab. Bengkulu Utara, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Rejang Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Lebong, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, meng embangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bengkulu		800.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.02.0023	Operasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi Rawa														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Panjang Jaringan Irigasi Rawa yang Dioperasikan dan Dipelihara				10 KM	500.000.000,00	Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkulu Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan serta Perluasan Konektivitas untuk Pemerataan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bengkulu		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.02.0032	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa														
			Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Irigasi dan Rawa yang Disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengembangan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan serta Perluasan Konektivitas untuk Pemerataan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bengkulu		750.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.02.1.02.0045	Operasional Kelembagaan Pengelola Irigasi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Lembaga Pengelola Irigasi yang beroperasi				1 Lembaga	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Melanjutka n pengemb angan infrastruktur dan mening katkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausah aan, mengo mbangkan industri kreatif serta mengemba ngkan agromaritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi.	2. Pengem bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	Daerah Irigasi Kewenangan Provinsi Bengkulu		250.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
3.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan lintas Kabupaten/Kota	-			28,13 Persen	200.000.000,00						-	500.000.000,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Tangga yang dilayani SPAM regional	-			12497 SR	200.000.000,00			-	1. Percepatan Pengentas an Kemiskinan dan Pening katan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-	-	500.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.1.01.0014	Pembinaan Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang Dibina dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				10 Kabupate n/Kota	50.000.000,00	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Percepatan Pengentas an Kemiskinan dan Pening katan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.1.01.0017	Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kapasitas Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang dibangun				400 Liter/Detik	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Seluma, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkulu Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Percepatan Pengentas an Kemiskinan dan Pening katan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Percepatan Pengentas an Kemiskinan dan Pening katan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
4.	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	-			-	9.650.000.000,00						-	10.350.000.000,00	
	1.03.04.1.01	Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional	-	-			-	9.650.000.000,00			-	1. Percepatan Pengentas an Kemiskinan dan Pening katan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-	-	10.350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.04.1.01.0013	Pembangunan TPA/TPST/SPA														
			Kapasitas TPA/TPST/SPA yang dibangun				300 Ton/hari	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kab. Bengkulu Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Percepatan Pengentas an Kemiskinan dan Pening katan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.04.1.01.0016	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun				3 Dokumen	9.550.000.000,00	Kab. Bengkulu Tengah, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	1. Percepatan Pengentasan an Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-		10.200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
5.	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	-	-			-	100.000.000,00						-	155.000.000,00	
	1.03.05.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik Regional	-	-			-	100.000.000,00			-	1. Percepatan Pengentasan an Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-	-	155.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.05.1.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)														
			Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN KELURAHAN	-	1. Percepatan Pengentasan an Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-		155.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
6.	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase bangunan gedung strategis yang ditingkatkan kualitasnya	-			19 Persen	10.100.000.000,00						-	10.300.000.000,00	
	1.03.08.1.01	Penetapan dan Penyelenggaraan Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi	Jumlah bangunan gedung strategis yang ditingkatkan kualitasnya	-			3 Unit	10.100.000.000,00			-	2. Penguatan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan serta Perluasan Konektivitas untuk Pemerataan	-	-	10.300.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1.03.08.1.01.0016		Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi yang Diubahsuaikan</i>				2 Bangunan Gedung	10.000.000.000,00	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		10.150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.08.1.01.0019		Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi</i>				3 Dokumen	0,00	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		0,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
1.03.08.1.01.0020		Pemeliharaan, Perawatan, dan Pemeriksaan Berkala Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Provinsi														
			<i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Provinsi yang Dipelihara, Dirawat, dan Diperiksa Berkala</i>				2 Bangunan Gedung	100.000.000,00	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengembangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		150.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
7.	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA	<i>Persentase bangunan gedung strategis yang ditingkatkan kualitasnya</i>	-			17,1 Persen	0,00						-	700.000.000,00	
	1.03.09.1.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah bangunan gedung strategis dan lingkungannya yang ditingkatkan kualitasnya</i>	-			1 Unit	0,00			-	2. Pengembangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-	-	700.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.09.1.01.0013	Penyusunan Rencana dan Teknis Tata Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan (RTBL) di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota				1 Dokumen	0,00	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.09.1.01.0019	Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kawasan Strategis Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota yang dilaksanakan penataan bangunan dan lingkungan				1 Kawasan	0,00	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		350.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
8.	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik	-			53.49 Persen	645.625.000.000,00						-	616.217.800.000,00	
	1.03.10.1.01	Penyelenggaraan Jalan Provinsi	Jumlah Panjang Jalan Provinsi Dalam Kondisi Baik	-			714,69 KM	645.625.000.000,00			-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-	-	616.217.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0030	Rehabilitasi Jalan														
			Panjang Jalan yang Direhabilitasi				3,6 KM	4.650.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		4.850.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG

RENCANA KERJA TAHUN 2026

DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
PROVINSI BENGKULU



NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.10.1.01.0031	Rekonstruksi Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>				80.7 KM	450.681.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengu- bangan Infr- astruktur yang Tangguh dan Berkel- anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		410.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0041	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan														
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i>				2 Dokumen	1.700.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengu- bangan Infr- astruktur yang Tangguh dan Berkel- anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		1.900.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan														
			<i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i>				1330,116 KM	1.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengu- bangan Infr- astruktur yang Tangguh dan Berkel- anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		1.100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0045	Pemeliharaan Rutin Jalan														
			<i>Panjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Rutin</i>				10.4 KM	15.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengu- bangan Infr- astruktur yang Tangguh dan Berkel- anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		18.367.800.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0053	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Provinsi														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Parjang Jalan/Jembatan Kewenangan Provinsi yang Penyelenggaraannya Diawasi</i>				12,4 KM	18.094.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkol anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		20.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0054	Pembangunan Jembatan														
			<i>Parjang jembatan yang dibangun</i>				12 Meter	131.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		133.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0056	Pemeliharaan Berkala Jalan														
			<i>Parjang Jalan yang Dipelihara dengan Pemeliharaan Berkala</i>				22.24 KM	20.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		22.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.10.1.01.0057	Pemeliharaan Rutin Jembatan														
			<i>Parjang Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin</i>				125 Meter	3.000.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		5.000.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
9.	1.03.11	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	<i>Persentase peserta yang bersertifikat/terlatih</i>	-			100 Persen	175.000.000,00						-	445.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.11.1.01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi	-			2 Kali	150.000.000,00			-	1. Percepatan Pengentas an Kemiskinan dan Pening katan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-	-	335.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.01.0009	Penyediaan Instruktur/Aesor/Penyelenggara Pelatihan Tenaga Ahli Konstruksi														
			Jumlah Instruktur/Aesor/Pen yelenggara Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli yang Disediakan				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Percepatan Pengentas an Kemiskinan dan Pening katan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-		100.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.01.0012	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Konstruksi														
			Jumlah Lembaga Jasa Konstruksi yang Dibina dan Ditingkatkan Kapasitasnya				10 Lembaga	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		160.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.01.0014	Fasilitasi Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli														
			Jumlah Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Ahli Difasilitasi Sertifikasi				10 Orang	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		75.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi (SIPJAKI) Cakupan Daerah Provinsi	Jumlah layanan informasi jasa konstruksi	-			1 Layanan	25.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.11.1.02.0009	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan SIPJAKI														
			Jumlah Pengelola SIPJAKI yang Ditingkatkan Kapasitasnya				9 Orang	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		110.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
10.	1.03.12	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	Persentase Terlaksananya penyelenggaraan Penataan ruang	-			75 Persen	225.000.000,00						-	425.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
	1.03.12.1.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang	undefined	-			undefined undefined	100.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.02.0006	Monitoring dan Evaluasi Penyusunan dan Penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota														
			Jumlah dokumen monitoring dan evaluasi penyusunan dan penetapan RTRW dan RDTR Kabupaten/Kota				1 Dokumen	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Provinsi	-			1 Laporan	125.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-	-	225.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03.0004	Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang														
			Jumlah laporan kegiatan koordinasi penyelenggaraan penataan ruang				1 Laporan	100.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		200.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
	1.03.12.1.03.0007	Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang														
			Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang				1 Dokumen	25.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pem erintahan	-		25.000.000,00	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN TATA RUANG
		UPTD SPAM REGIONAL KOBEMA						2.635.000.000,00							5.300.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						2.635.000.000,00							5.300.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						2.635.000.000,00							5.300.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	35.000.000,00						-	100.000.000,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	-	-			-	35.000.000,00			-	1. Percepatan Pengentas an Kemiskinan dan Pening katan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-	-	100.000.000,00	UPTD SPAM REGIONAL KOBEMA
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAHA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Percepatan Pengentas an Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-		100.000.000,00	UPTD SPAM REGIONAL KOBEMA
2.	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Presentase rumah tangga dengan akses air minum jaringan perpipaan lintas Kabupaten/Kota	-			64 Persen	2.600.000.000,00						-	5.200.000.000,00	
	1.03.03.1.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota	Cakupan Rumah Tangga yang dilayani SPAM regional	-			24000 SR	2.600.000.000,00			-	1. Percepatan Pengentas an Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-	-	5.200.000.000,00	UPTD SPAM REGIONAL KOBEMA
	1.03.03.1.01.0019	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)														
			Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang dioperasikan dan dipelihara				2 Unit	2.500.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Percepatan Pengentas an Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-		5.000.000.000,00	UPTD SPAM REGIONAL KOBEMA
	1.03.03.1.01.0021	Fasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														
			Jumlah Kabupaten/Kota yang difasilitasi Kerja Sama Penyelenggaraan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)				3 Kabupaten/ Kota	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Percepatan Pengentas an Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-		100.000.000,00	UPTD SPAM REGIONAL KOBEMA
	1.03.03.1.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			<i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Lintas Kabupaten/Kota yang disusun</i>				1 Dokumen	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	1. Percepatan Pengentasan Kemiskinan dan Peningkatan Kualitas SDM yang Berdaya Saing	-		100.000.000,00	UPTD SPAM REGIONAL KOBEMA
		UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN						285.000.000,00							280.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						285.000.000,00							280.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						285.000.000,00							280.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	<i>Persentase Alat Berat dan Alat Bantu Dalam Kondisi Baik</i>	-			85 Persen	285.000.000,00						-	280.000.000,00	
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	<i>Jumlah jenis Administrasi Umum perangkat Daerah yang tersedia</i>	-			1 Jenis	35.000.000,00			-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-	-	80.000.000,00	UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	35.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	4. Inovasi dan Tata Kelola Pemerintahan	-		80.000.000,00	UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Persentase Alat Berat dan Alat Bantu yang dipelihara</i>	-			85 Persen	250.000.000,00			-	2. Pengembangan Infrastruktur yang Tangguh dan Berkelanjutan serta Perluasan Konektivitas untuk Pemerataan	-	-	200.000.000,00	UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN
	1.03.01.1.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinnannya				10 Unit	250.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		200.000.000,00	UPTD PERALATAN DAN PERBENGKELAN
		UPTD PENGUJIAN BIDANG KONSTRUKSI DAN BANGUNAN						215.000.000,00							450.000.000,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						215.000.000,00							450.000.000,00	
	1.03	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG						215.000.000,00							450.000.000,00	
1.	1.03.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	-	-			-	215.000.000,00						-	450.000.000,00	
	1.03.01.1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	-			3 orang	15.000.000,00			-	-	-	-	50.000.000,00	UPTD PENGUJIAN BIDANG KONSTRUKSI DAN BANGUNAN
	1.03.01.1.05.0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				3 Orang	15.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	-	-	-		50.000.000,00	UPTD PENGUJIAN BIDANG KONSTRUKSI DAN BANGUNAN
	1.03.01.1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	-			1 paket 1 paket	50.000.000,00			-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-	-	100.000.000,00	UPTD PENGUJIAN BIDANG KONSTRUKSI DAN BANGUNAN
	1.03.01.1.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB	
							TARGET 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
											NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
			<i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>				1 Paket	50.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DAHA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		100.000.000,00	UPTD PENGUJIAN BIDANG KONSTRUKSI DAN BANGUNAN	
	1.03.01.1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>	-			55 unit	150.000.000,00			-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-	-	300.000.000,00	UPTD PENGUJIAN BIDANG KONSTRUKSI DAN BANGUNAN	
	1.03.01.1.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya															
			<i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>				55 Unit	150.000.000,00	Kota Bengkulu, Semua Kecamatan, Semua KeliDesa	DAHA ALOKASI UMUM (DAU)	-	2. Pengem- bangan Infr astruktur yang Tangguh dan Berkel anjutan serta Perluasan Konektivita s untuk Pe merataan	-		300.000.000,00	UPTD PENGUJIAN BIDANG KONSTRUKSI DAN BANGUNAN	
		J U M L A H						699.833.391.800,00							707.130.400.450,00		

BAB V

PENUTUP

5.1 PEDOMAN TRANSISI

Rancangan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu Tahun 2025 - 2029 merupakan penjabaran dari visi dan misi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Bengkulu 2025 - 2029. Rencana Strategis yang disusun berfungsi sebagai pedoman, penentu arah, sasaran dan tujuan bagi aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan, dan pelaksanaan pelayanan kepada stakeholder. Dimana dalam pelaksanaan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang setiap tahunnya dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum.

Terwujudnya perencanaan pembangunan Provinsi Bengkulu yang terarah, terpadu, komprehensif dan berkesinambungan perlu didukung oleh:

1. Komitmen dari Pemerintah Daerah untuk merealisasikan revitalisasi lembaga teknis guna mendukung keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang profesional.
2. Dengan didukung SDM yang potensial dan handal, Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang berupaya mewujudkan mekanisme perencanaan dan pembangunan secara akuntabel, transparan dan konsisten berlandaskan komitmen yang dibangun dan disepakati.
3. Terjalinnya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi serta partisipasi aktif dari seluruh pemangku kepentingan di lingkungan Dinas Pekerjaan Umum.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagai pedoman pelaksanaan perencanaan pembangunan sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu terutama pada awal periode Renstra, dijadikan sebagai pedoman penyusunan Renstra dan Rencana Kerja tahun pertama pada periode berikutnya.

5.2 Kaidah Pelaksanaan

Rancangan Rencana Strategis tahun 2025 - 2029 merupakan acuan bagi seluruh jajaran aparatur Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu dalam menjalankan tugas dan fungsi guna mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sehingga keberadaan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu sebagai salah satu lembaga teknis dalam melaksanakan pemerataan pembangunan baik yang bersifat fisik maupun non fisik yang ada di provinsi Bengkulu secara berkesinambungan mengacu pada RPJMD Provinsi Bengkulu.

Implementasi Renstra ini mensyaratkan pentingnya sinkronisasi dan koordinasi lintas bidang dengan tetap memperhatikan peran, kewenangan, tanggung jawab dan tugas masing-masing, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sikap yang mengedepankan ego sektoral harus dihilangkan agar terjadi sinergisitas, efisiensi dan akselerasi dalam perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian serta pengawasan pembangunan di Provinsi Bengkulu.

Dalam kaitan tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi Rencana Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, yang mengacu pada Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu 2025 - 2029 yang meliputi:

1. Setiap elemen dalam lingkup Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bengkulu berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan dengan sebaik-baiknya
2. Renja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tahun 2026 menjadi pedoman setiap bidang dalam menyusun Rencana Kerja yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana tahunan.

Bengkulu, 23 JULI 2025

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Provinsi Bengkulu



TEJO SUROSO, ST, MT

NIP. 19781214 200502 1 003